

***Affirmative Action* Partai Dalam Pencalonan Politisi Perempuan Anggota DPRD Kota Makassar (Studi Komparasi Partai PPP Dan PDIP Kota Makassar)**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Ilmu Politik Jurusan Ilmu Politik
pada Fakultas Ushuluddin, Filsafat, dan Politik
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
NURUL FADLIYAH .J
NIM. 30600112076
ALAUDDIN
MAKASSAR

**FAKULTAS USHULUDDIN, FILSAFAT DAN POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN
MAKASSAR**

2016

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nurul Fadliyah

Nim : 3060012076

Jurusan/Prodi : Ilmu Politik

Program Studi : S1

Fakultas : Ushuluddin, Filsafat,&Politik

Judul Skripsi : *Affirmative action* Pencalonan Politisi Perempuan Anggota DPRD Kota Makassar (studi komparasi Partai PPP Dan PDIP Kota Makassar)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi saya ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan skripsi saya ini adalah asli hasil karya/penelitian sendiri dan bukan plangiasi dari karya/penelitian orang lain.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya agar dapat diketahui oleh dewan anggota penguji.

Makassar, 19 Agustus 2016

Yang Menyatakan:

NURUL FADLIYAH
NIM: 30600112076

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "*Affirmative Action* Partai Dalam Pencalonan Politisi Perempuan Anggota DPRD Kota Makassar (Studi Komparasi Partai PPP Dan PDIP Kota Makassar)", yang disusun oleh NURUL FADLIYAH, NIM: 30600112076, mahasiswa Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ushuluddin, Filsafat, dan Politik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* oleh Dewan Penguji yang diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 14 bulan 09 2016, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik dengan beberapa perbaikan.

Samata, 14 09 2016

DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr.Abdullah,M.Ag

(.....)

Sekretaris : Syahrir Karim, M.Si,Ph.D.

(.....)

Munaqisy I : Prof.Dr. H. Muh. Natsir, MA.

(.....)

Munaqisy II : Syahrir Karim, M.Si, Ph.D.

(.....)

Pembimbing I : Prof.Dr.Muh. Saleh Tajuddin,MA,Ph.D.

(.....)

PembimbingII :Ismah Tita Ruslin,S.IP,M.Si

(.....)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN
MAKASSAR

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Ushuluddin, Filsafat, dan Politik
UIN Alauddin Makassar

(.....)

Prof. Dr. H. Muh. Natsir, MA.
NIP: 19590704 198903 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulis Skripsi Saudara **Nurul Fadliyah, NIM : 30600112076**, Jurusan Ilmu Politik pada Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar, setelah dengan seksama mengoreksi Proposal Skripsi yang bersangkutan dengan Judul “*Affirmative Action Partai Dalam Pencalonan Politisi Perempuan Anggota DPRD Kota Makassar (Studi Komparasi Partai PPP Dan PDIP Kota Makassar)*”. Memandang bahwa Proposal Skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat Ilmiah dan disetujui untuk diajukan ke sidang Seminar Hasil. Demikian persetujuan ini diberikan untuk dipergunakan dan diproses selanjutnya.



Makassar, Agustus 2016

Pembimbing I

Pembimbing II

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Prof.Dr.Muh. Saleh Tajuddin,MA,Ph.D.
NIP. 19681110199301 1 006

Ismah Tita Ruslin,S.IP,M.Si
NIP. 19780428 200912 2 002

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbil'alam, segala puji syukur ke hadirat Allah Swt atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “ ***Affirmative Action Partai Dalam Pencalonan Politisi Perempuan Anggota DPRD Kota Makassar (Studi Komparasi Partai PPP Dan PDIP Kota Makassar)*** ”

. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Saw., sebagai *uswatun hasanah* dalam meraih kesuksesan di dunia dan akhirat.

Melalui tulisan ini saya ucapkan untuk yang Teristimewa dan yang utama sekali penulis sampaikan terima kasih yang paling tulus kepada Ayahanda **Abd.Jabbar Saleh** dan Ibunda **St.Syarifah S.pd** serta saudara-saudaraku **Nur Cholis Jabbar dan Nur Cholis Jabbar**, yang merupakan sumber inspirasi dan motivasi melalui perhatian dan kasih sayang, nasehat, dukungan moril serta materil terutama doa restu demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka korbankan selama ini menjadi mahkota keselamatan di dunia dan di akhirat.

Keberhasilan penulisan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, pengarahan dan bantuan dari berbagai pihak baik berupa pikiran, motivasi, tenaga, maupun do'a. Karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.Si selaku Rektor UIN Alauddin Makassar beserta seluruh jajarannya.

2. Bapak Prof. Dr. H. Muh. Natsir Siola, MA selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Filsafat Dan Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
3. Bapak Dr. Syarifuddin Jurdi, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Politik dan Syahrir Karim, M.Si. Ph.D selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Politik.
4. Bapak Prof.Dr.Muh. Saleh Tajuddin,MA,Ph.D. selaku Pembimbing I dan Ibu Ismah Tita Ruslin,S.IP,M.Si selaku Pembimbing II yang telah sabar dan banyak memberikan bimbingan, nasehat, saran, dan mengarahkan penulis dalam perampungan penulisan skripsi ini.
5. Seluruh dosen jurusan Ilmu Politik Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar yang telah menyalurkan ilmunya kepada penulis selama berada di bangku kuliah.
6. Segenap karyawan dan karyawanati Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik yang telah bersedia melayani penulis dari segi administrasi dengan baik selama penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
7. Seluruh teman-teman seperjuangan angkatan 2012 yang telah memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan studi serta dukungan dan canda tawa yang menyisakan kesan mendalam di hati.
8. Kanda-kanda senior dan adik-adikku, serta seluruh warga **HMJ Ilmu Politik** sebagai keluarga keduaku atas pengalaman dan nasehat-nasehatnya sehingga penulis dapat lebih mengerti arti pentingnya kebersamaan.

9. Sahabat-sahabatku M. Hafid Hidayatullah, seperjuangan Nur Fahirah, Fatimah K, St. Nurhaedah, Sri Sumarni Sjahril, Nurlia Irfan, Dwi nanda wahyuni yang tak pernah bosan mengingatkan dan memberi semangat dalam menjalani masa-masa kuliah.
10. Teman-teman seperjuanganku selama **KKN Profesi Angkatan 6** di Desa Bonto tappalang, Kec.Tompobulu Kab.Bantaeng yang selalu memberi semangat dalam menjalani proses ini.
11. Teman-teman yang telah membantu penulis dalam proses pengambilan data di lapangan dan telah banyak memberikan bantuan berupa moril dan materil yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Rasa terima kasih yang tiada hentinya penulis haturkan, semoga bantuan yang telah diberikan bernilai ibadah di sisi Allah Swt., dan mendapat pahala yang setimpal. Amin.

Akhirnya, diharapkan agar hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan menambah khasanah ilmu pengetahuan.

Amin Ya Rabbal Alamin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Makassar,

2014

Penulis

DAFTAR ISI

JUDUL

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PENGESAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
ABSTRAK	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Tinjauan Pustaka	9
E. Kerangka Teori	13
F. Metode Penelitian	19
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	24
A. Gambaran Umum Kota Makassar	24
B. Gambaran Umum Partai PPP	28
C. Gambaran Umum Partai PDIP	30
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Upaya yang dilakukan oleh PDIP Dan PPP dalam mempercepat kesetaraan gender pada pencalonan politisi Kota Makassar periode 2014-2019	35
B. Faktor penghambat <i>affirmative action</i> perempuan PDIP dan PPP pada pencalonan perempuan Kota Makassar 2014-2019	51
BAB IV PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	

ABSTRAK

Nama Penulis : Nurul Fadliyah
Nim : 30600112076
Judul Skripsi : *Affirmative Action* Partai Dalam Pencalonan Politisi Perempuan Anggota DPRD Kota Makassar (Studi Komparasi Partai PPP Dan PDIP Kota Makassar)

Skripsi ini membahas tentang *affirmative Action* Partai Dalam Pencalonan Politisi Perempuan Anggota DPRD Kota Makassar (Studi Komparasi Partai PPP Dan PDIP Kota Makassar). Latar belakang masalah ini berbicara mengenai Substansi kuota 30% perempuan adalah tindakan perlakuan khusus sementara bagi perempuan artinya mempercepat persamaan posisi dan kondisi yang adil bagi perempuan yang termarginalkan dan lemah secara sosial dan politik, serta mendorong pengakuan, persamaan kesempatan, dan penikmatan hak asasi perempuan. Penelitian ini menguraikan tentang perbandingan partisipasi politik perempuan di Partai PDIP dan Partai PPP, diketahui bahwa partai PDIP sebagai partai yang berbasis Nasionalis sedangkan partai PPP yang berbasis Nasionalis Religius. Dari PPP memiliki calon politisi perempuan 17 orang, sedangkan PDIP 14 orang. Sementara hasil dari pencalonan politisi DPRD kota Makassar terpilih 1 politisi perempuan di DPRD kota Makassar periode 2014. Melihat belum tercapainya politisi perempuan pada PPP sehingga menjadi alasan penulis untuk melakukan penelitian tentang *affirmative action* Partai Dalam Pencalonan Politisi Perempuan Anggota DPRD Kota Makassar (studi komparasi partai PPP dan PDIP kota Makassar).

Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analisis untuk menggambarkan mengenai *affirmative action* pencalonan politisi perempuan di Kota Makassar. teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan *library research* yang meliputi kutipan langsung dan tidak langsung dan *filed research* meliputi observasi, wawancara dan dokumenter. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan historis teologis dan politik. Data dianalisis melalui deskriptif analisis. Selain itu penulis menggunakan metode komparatif yang membandingkan partai PDIP dan PPP.

Dari hasil penelitian menjelaskan bahwa upaya yang dilakukan oleh PDIP dalam mempercepat kesetaraan gender adalah dengan cara melakukan perekrutan dan melakukan kegiatan khusus untuk perempuan seperti menjahit dan memasak dengan kegiatan tersebut dapat dilihat perempuan yang menjalankan tugasnya dengan baik maupun sebaliknya. Selain itu kegiatan tersebut juga mampu merebut suara pemilih khususnya perempuan. Sedangkan PPP melakukan upaya dengan membentuk organisasi pembinaan, serta panduan untuk perempuan agar melahirkan kandidat yang mempunyai kualitas dan kuantitas. Faktor penghambat *affirmative action* dari partai PDIP adalah keterbatasan waktu dan budaya, perempuan harus membagi waktu antara keluarga dan politik atau lembaga, serta budaya masih menganggap laki-laki lebih layak berada dalam suatu lembaga dibandingkan perempuan. Sedangkan dari partai PPP, faktor penghambatnya mengenai faktor internal dan eksternal. internal adalah waktu *financial*, dan dualisme. perempuan sulit untuk mengatur waktu antara keluarga dan lembaga. sedangkan *financial* tidak banyak perempuan mau mengorbankan *financial* yang banyak untuk sebuah jabatan. faktor eksternalnya adalah upaya tim sukses yang kurang membantu kandidat dan masyarakat yang kurang jeli memilih calon, karna lebih memilih yang mempunyai *financial* lebih. Dualisme banyak pihak yang berusaha saling menjatuhkan satu sama lain.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Affirmative action adalah sebuah tindakan khusus yang merupakan semacam pemaksaan untuk pemerataan dalam suatu kelompok yang mengalami diskriminasi. Ada beberapa definisi untuk istilah ini, yang sebagian besar mengandung pengertian yang terkait pada masalah diskriminasi ras, sesuai dengan sejarahnya, yang berasal dari Amerika Serikat, yang pernah mengalami masalah diskriminasi ras. Kebijakan *Affirmative Action* banyak dilakukan pada masalah pendidikan, pembangunan pemerintahan, pekerjaan, atau kesejahteraan sosial. *Affirmative action* dimulai sebagai koreksi dari pemerintahan dan ketidakadilan sosial yang lampau terhadap sekelompok orang. Kelompok ini biasanya dibedakan berdasarkan ras, gender atau budaya.

Nuansa politik di Indonesia juga masih mengalami masalah diskriminasi gender dalam hal jumlah perempuan yang berpartisipasi aktif didalamnya, salah satunya adalah sisi keterwakilan perempuan. Masalah keterwakilan perempuan mengemuka dan menjadi realitas politik setelah masalah ini diatur dalam Pasal 65 ayat 1. Dinyatakan bahwa partai politik dalam mengajukan pencalonan anggota legislatif dapat memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%. Walaupun rumusan ini sangat lentur dan tidak mengandung unsur sanksi, namun dianggap sebagai terobosan penting dalam upaya meningkatkan keterwakilan perempuan melalui kebijakan politik. Kuota 30 % caleg perempuan merupakan suatu

affirmative action yang berisi kebijakan kuota bagi perempuan agar bisa masuk ke dalam jajaran politik melalui calon legislatif.

Untuk mempertegas kuota 30% keterwakilan perempuan pada pemilu 2014, Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuat kebijakan kuota 30% keterwakilan perempuan yang menimbulkan kontroversi. Kebijakan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam PKPU No. 7 Tahun 2013 memberikan konsekuensi kepada partai politik peserta pemilu 2014 untuk memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan berdasarkan alokasi kursi pada setiap daerah pemilihan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Apabila partai politik peserta pemilu 2014 tidak dapat memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan disetiap tingkatan maka partai politik tersebut dinyatakan tidak memenuhi persyaratan pengajuan bakal calon pada daerah pemilihan yang tidak memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan. Artinya, daerah pemilihan suatu partai politik akan dihapuskan apabila tidak memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan walaupun bakal calon lain partai politik dalam daerah pemilihan tersebut dinyatakan memenuhi persyaratan¹. Konsekuensi dari kebijakan KPU inilah yang pada akhirnya menimbulkan kontroversi.²

Politik adalah berbagai kegiatan dalam suatu sistem politik (Negara) yang menyangkut proses pengambilan keputusan untuk menentukan tujuan dari sistem

¹ Safitri, 2007 "Affirmative action 30% Kouta Caleg Perempuan Sebuah Semboyan?", *jurnal psikologi Universitas Indonusa Esa Unggul*, H.69

² Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2008). H.16

itu, menyusun skala prioritas dari tujuan-tujuan yang telah dipilih. Menurut Andrew Heywood “politik kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemenkan peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya yang berarti tidak dapat terlepas dari gejala konflik dan kerjasama”.

Perempuan Indonesia kini mengalami ketimpangan sosial dan budaya. Di berbagai penjuru Nusantara banyak perempuan yang buta atau dibutakan secara struktural akan potensi dirinya sehingga hanya menjalankan peran skunder dalam masyarakat. Patut disayangkan karena secara demografi jumlah perempuan di Indonesia lebih banyak dari pria. Padahal jika perempuan mendapat kesempatan dan peran yang seimbang dengan pria, maka potensi sumber daya manusia Indonesia menjadi jauh lebih besar, dan hal tersebut akan menguntungkan dan memberi manfaat bagi pembangunan bangsa. Isu-isu tentang gender, menurut Oskamp dan Constanzo merupakan hal yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Banyak hal di dalam budaya Indonesia dibatasi dengan persepsi masyarakat tentang dikotomi gender, yaitu perbedaan ruang dan peran antara laki-laki dan perempuan.

Seperti pula halnya dalam buku *feminisme dan fundamentalisme islam*, mengatakan bahwa pada tahun 1990-an feminisme memperlihatkan suatu keinginan baru dan menggembirakan untuk melakukan kritisme diri, usaha-usaha menuju pada teori-teori dan konsep-konsep yang mencakup segala hal dan komitmen-komitmen ideologis sebelumnya untuk menguniversalkan perspektif-perspektif dari apa yang selalu berubah menjadi sekedar sebuah kelas kebudayaan, ras tunggal dan tertentu.

Penting harus diingat bahwa dalam masyarakat islam, tidak ada satupun ideologi dan gerakan feminisme islam yang menegaskan dirinya sendiri dan atau mudah teridentifikasi . dalam kata lain, ,masyarakat islam mayoritas perempuan yang sadar gender, baik muslim maupun non muslim yang, dalam beberapa hal aktif dalam memperjuangkan hak-hak perempuan jarang mengenditifikasikan diri mereka oleh pihak lain sebagai kelompok feminis, baik femnis muslim maupun lainnya.³

Berkaitan dengan hal tersebut hadist dibawah ini menjelaskan tentang larangan bagi kaum perempuan untuk menjadi seorang pemimpin.

Seperti halnya yang dijelaskan oleh M.Quraish Shihab dalam bukunya “Perempuan”, membahas tentang perempuan dan politik, dimana lebih lanjut dikembangkan oleh beliau bahwa peran dan partisipasi politik perempuan itu telah diatur dalam konteks Islam, tidak boleh meninggalkan nilai yang ditetapkan⁴. Mengutip surah an-Nisa ayat 34 dibawah ini:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا
حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي
الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

³ Syafiq Hasyim, *Feminisme Dan Fundamentalisme*, (Yogyakarta: PT Lkis Pelangi Aksara, 2005), H.170

⁴ Quraish Shihab, *Perempuan*, (Tangerang, Lentera Hati, 2005), H.343

Terjemahnya :

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang ta'at kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka) Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar

Adapun maksud dari ayat diatas adalah dapat dijelaskan pula bahwasanya masing-masing dari suami istri memiliki keistimewaan sendiri-sendiri. Tetapi, keistimewaan yang dimiliki laki-laki lebih menunjang tugas kepemimpinan dari pada tugas yang dimiliki perempuan. Disisi lain, yang dimiliki perempuan lebih menunjang tugasnya sebagai pemberi rasa damai dan tenang kepada laki-laki serta lebih mendukung fungsinya dalam mendidik dan membesarkan anak-anaknya. Allah menciptakan manusia terdiri dari laki-laki dan wanita saling berpasang-pasangan berdasarkan prinsip umum dalam membangun alam ini.

Adapun ayat yang berkaitan dengan perempuan dan kekuasaan adalah QS.At-

Taubah {9}:71

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

Terjemahannya :

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan mereka ta'at kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Sedangkan dibagian yang lain dari buku *Analisis Gender* ketidakadilan gender harus dihentikan. Memperjuangkan keadilan gender merupakan tugas berat karena masalah gender adalah masalah yang sangat intens. Dimana kita masing-masing terlibat secara emosional. Banyak terjadi perlawanan manakala perjuangan ketidakadilan gender. Dengan demikian bila memikirkan jalan keluar permasalahan gender perlu dilakukan secara serempak. Sedangkan untuk jangka panjangnya untuk memikirkan bagaimana menurunkan cara strategis dalam rangka memerangi ketidakadilan. Dari segi jangka pendek dapat dilakukan upaya-upaya program aksi yang melibatkan perempuan agar mereka mampu mengatasi masalahnya sendiri. Misalnya dalam hal marginalisasi perempuan diperojek peningkatan pendapatan kaum perempuan, perlu melibatkan dalam program pengembangan masyarakat serta berbagai kegiatan yang memungkinkan kaum perempuan terlihat dan menjalankan kekuasaan *diessctor public*. Perlu juga diupayakan program pendidikan dan mengaktifkan berbagai organisasi atau kelompok perempuan untuk jangka pendek⁵

⁵ Mansour Fakih, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1999), H.12

Keterwakilan perempuan khususnya di DPRD kota Makassar priode 2014-2019 pemilu legislatif di kota Makassar bahwa jumlah kursi DPRD kota Makassar sebanyak 50 orang terdiri dari 42 laki-laki dan 8 perempuan. Untuk melihat persoalan minimnya perempuan dalam parlemen tersebut, maka kita akan melihat peraturan yang berlaku saat ini, dalam peraturan undang-undang nomor 8 tahun 2012, bahwa daftar bakal calon anggota legislatif yang diajukan partai politik, memuat kouta 30% perempuan.⁶

Substansi kuota 30% perempuan adalah tindakan perlakuan khusus sementara bagi perempuan artinya mempercepat persamaan posisi dan kondisi yang adil bagi perempuan yang termarginalkan dan lemah secara sosial dan politik, serta mendorong pengakuan, persamaan kesempatan, dan penikmatan hak asasi perempuan. Pencalonan politisi perempuan DPRD kota Makassar tahun 2014 terhadap komparasi PPP dan PDIP. Penelitian ini menguraikan tentang perbandingan partisipasi politik perempuan di Partai PDIP dan Partai PPP, diketahui bahwa partai PDIP sebagai partai yang berbasis Nasionalis sedangkan partai PPP yang berbasis Nasionalis Religius. Dari PPP memiliki calon politisi perempuan 17 orang, sedangkan PDIP 14 orang. Sementara hasil dari pencalonan politisi DPRD kota Makassar terpilih 1 politisi perempuan di DPRD kota Makassar periode 2014. Melihat belum tercapainya politisi perempuan pada PPP sehingga menjadi alasan penulis untuk melakukan penelitian tentang *affirmative action* Partai Dalam Pencalonan Politisi Perempuan

⁶ <http://www.kabarmakassar.com/50-politisi-resmi-wakili-rakyat-kota-makassar>, diakses, 11-04-2016

Anggota DPRD Kota Makassar (studi komparasi partai PPP dan PDIP kota Makassar).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh PDIP dan PPP dalam mempercepat kesetaraan gender pada pencalonan politisi perempuan kota Makassar priode 2014-2019?
2. Apa faktor penghambat *affirmative action* perempuan PPP dan PDIP pada pencalonan politisi legislatif perempuan kota Makassar priode 2014-2019?

C. Tujuan dan kegunaan

Secara umum dalam suatu penelitian skripsi tidak akan terlepas maksud dari tujuan dan manfaat penelitian tersebut. Begitupun dengan penelitian skripsi yang dilakukan oleh penulis mengenai *affirmative action* dalam pencalonan politisi perempuan anggota DPRD kota Makassar studi komperasi partai PPP dan PDIP kota Makassar.

1. Tujuan
 - a. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh PDIP dan PPP dalam mempercepat kesetaraan gender di legislatif kota Makassar priode 2014-2019 sehingga dapat terpenuhinya kouta 30% seperti yang telah dituliskan dalam penetapan kebijakan komisi pemilihan umum (KPU).
 - b. Untuk mengetahui faktor penghambat *affirmative action* perempuan PPP dan PDIP di DPRD kota Makassar priode 20014-2019 sehingga komisi umum KPU membuat kebijakan kouta 30% keterwakilan perempuan.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara ilmiah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada dunia akademik khususnya perempuan mengenai *affirmative action* dalam pencalonan politisi perempuan di DPRD kota Makassar.
- b. Secara praktis untuk memberikan gambaran lebih luas kepada perempuan mengenai penempatan atau kedudukan perempuan didalam partai dan sebagai sumbangan yang berharga kepada para politisi perempuan yang berada di parlemen .

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan salah satu metode untuk melakukan penelitian dalam bentuk kepustakaan. Indikasinya melacak dan menelusuri literature yang memiliki substansi kajian sebagaimana inti pembahasan dalam penelitian ini secara komprehensif.

Demi melengkapi referensi, penulis mengangkat beberapa kajian pustaka untuk mendukung skripsi ini, antara lain sebagai berikut :

Fathia Harsyah dalam skripsinya ”Perbandingan Partisipasi Politik Perempuan Di Partai Nasdem Dan PKS Kabupaten Batubara. Penelitian ini menguraikan tentang perbandingan partisipasi politik perempuan di Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Batubara. Perbandingan partisipasi politik perempuan akan membandingkan bagaimana partisipasi politik perempuan pada Partai NASDEM dan PKS ikut dalam proses perumusan kebijakan dan pandangan mengenai

perspektif gender dari Partai NASDEM sebagai partai yang berbasis Nasionalis dan Partai Keadilan Sejahtera yang berbasis nasionalis Religius serta para partisipasi perempuan Partai NASDEM dan PKS dalam menjalankan kebijakan mengenai perempuan dan menghapuskan tindakan diskriminasi terhadap perempuan yaitu *Affirmative Action*. sedangkan yang diteliti oleh penulis mengenai *affirmative action* Partai dalam pencalonan politisi perempuan anggota DPRD Kota Makassar (studi komparasi partai PPP dan PDIP Kota Makassar). Dalam skripsi Fathia Harsyah sama-sama membahas mengenai kebijakan perempuan dalam sebuah partai, membandingkan antara partisipasi partai NASDEM dan PKS di Kabupaten Batubara. bagaimana partisipasi politik perempuan dalam perumusan kebijakan. Dan peneliti menuliskan mengenai pencalonan politisi perempuan di partai PDIP dan PPP dalam pemenuhan kouta 30%.⁷

Cholida Eka Anggaraini dalam skripsinya'' Analisis Komparatif Rekrutmen Perempuan Dalam Partai Politik Studi Kasus PDIP Dan PKS Kota Surakarta. Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana strategi komunikasi politik partai politik dalam rekrutmen perempuan. Untuk mengetahui peran perempuan dalam partai politik dilakukan dengan membandingkan PDI Perjuangan dan PKS Kota Surakarta. Perbedaan skripsi yang dibuat oleh Cholida Eka Anggraini dengan skripsi yang diteliti oleh penulis adalah dilihat dari perbandingan partainya penulis berfokus

⁷Fathiah Harsyah , ''Perbandingan Partisipasi Politik Perempuan di Partai Nasdem dan PKS Kabupaten Batubara, *jurnal*, Universitas Sumatra Utara Fakultas Hukum, 2013.

ke partai PDIP dan partai PPP untuk memberikan konsekuensi kepada partai politik peserta pemilu 2014-2019 di Kota Makassar.⁸

Rosmiati Ibrahim dalam skripsinya “ Perempuan Dan Politik (Studi Tentang Keterwakilan Politik Perempuan di DPRD Kabupaten Bima” skripsi ini menjelaskan Keterwakilan politik perempuan di DPRD kabupaten Bima masih banyak penghambat pada perempuan sehingga perempuan tidak perlu ikut serta dalam politik, yakni masih kentalnya pemahaman kultur social dan pemahaman agama. Sehingga penyebab keterwakilan perempuan adalah kurangnya kesadaran perempuan dalam pendidikan politik antara konsep hak asasi manusia (HAM) dengan masyarakat di kabupaten Bima. Masyarakat kabupaten Bima diajarkan bahwa perempuan itu tidak layak jadi pemimpin karena tubuhnya sangat lembut dan lemah. Akalnya pendek lagi pula kaum laki-laki dilembaga DPRD belum mampu digeserkan oleh perempuan. Namun demikian bukan berarti perempuan tidak memiliki kemampuan peran penting dalam memegang strategi dalam ranah public. Setidaknya telah dibuktikan oleh Dra.Hj.Muliyati perempuan di DPRD kabupaten Bima selama dua periode berturut-turut.⁹ Sedangkan dalam skripsi penulis, membahas mengenai *affirmative action* bagaimana cara pemenuhan kuota 30% terhadap calon politisi perempuan di Kota Makassar, sehingga perempuan mendapatkan hak-haknya dalam dunia politik.

⁸Cholidah Eka Anggraini, *Analisis Komparatif Rekrutmen Perempuan Dalam Partai Politik Studi Kasus PDIP dan PKS Kota Surakarta*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014.

⁹Maryam, *Perempuan Dan Politik (Studi Tentang Keterwakilan Politik Perempuan di DPRD Kabupaten Bima)*, (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Fakultas Ushuluddin, Filsafat, dan Ilmu Politik, 2013)

Ririn Ramdani dalam skripsinya “Perempuan Politik dan Parlemen di Kota Makassar” Skripsi ini membahas tentang perempuan parlemen yaitu perempuan, politik parlemen di kota Makassar (studi keterwakilan perempuan pasca pemilu 2014). Berdasarkan undang-undang No 12 tahun 2003 pasal 65 ayat 1 tentang DPRD kabupaten atau kota Indonesia dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% adanya peraturan tersebut dapat meningkatkan perempuan dimasyarakat. Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini antara lain : untuk mengetahui distribusi caleg perempuan kota Makassar priode 2014-2019 pada setiap partai untuk mengetahui distribusi caleg perempuan kota Makassar priode 2014-2019 pada setiap dapil, dan untuk mengetahui keterwakilan perempuan di parlemen kota Makassar priode 2014-2019. Penelitian ini menjelaskan keterwakilan perempuan pasca pemilu pada parlemen kota Makassar. Sama halnya dengan penelitian yang telah dibuat oleh penulis, lokasi yang diteliti oleh penulis disini adalah di daerah Makassar. Perbedaannya, penulis meneliti mengenai upaya yang dilakukan dari partai PDIP dan PPP untuk memenuhi kebijakan yang telah dibuat oleh KPU yaitu pemenuhan kuota 30% untuk setiap partainya.¹⁰

Andi Oriza Rania Putrid dalam skripsinya “Implementasi Ketentuan 30% Kuota Keterwakilan Perempuan Dalam Daftar Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Dan Kota Makassar” Berdasarkan hasil penelitian penulis merumuskan saran sebagai berikut: 1) Setiap Partai Politik seyogyanya

¹⁰Ririn Ramdani “*Perempuan, Politik, dan Parlemen Di Kota Makassar*” (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Fakultas Ushuluddin, Filsafat, dan Ilmu Politik, 2015)

menghadirkan Sistem baru untuk menyeleksi kandidat dan mekanisme-mekanisme pengambilan kebijakan yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas publik juga harus segera disusun dalam menyongsong pemilu 2014. 2) perlu juga dikembangkan jaringan-jaringan kerja yang saling mendukung, yang dapat dijadikan basis kolaborasi kaum perempuan didalam masyarakat Indonesia. 3) menuntut konsistensi Parpol pasca pembatalan pasal 214 UU pemilu No 10 tahun 2008, konsistensi dengan sistem kuota dalam rangka mewujudkan *affirmative action*.

Hampir sama dengan penelitian yang dibuat oleh Andi Oriza, mengenai ketentuan kouta 30% keterwakilan perempuan dalam daftar calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Dan Kota Makassar, penulis juga berfokus kepada pemenuhan kouta 30% untuk politisi perempuan di Kota Makassar. Yang membedakan adalah penulis memasukkan partai PDIP dan PPP dalam tulisannya.

E. Kerangka teori

1. Teori Partisipasi

Teori partisipasi adalah pelaksanaan suatu kegiatan tidak terlepas dari tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Partisipasi adalah penentuan sikap dan keterlibatan hasrat setiap individu dalam situasi dan kondisi organisasinya, sehingga pada akhirnya mendorong individu tersebut untuk berperan serta dalam pencapaian tujuan organisasi, serta ambil bagian dalam setiap pertanggungjawaban bersama.¹¹

¹¹Inu Kencana Syafie, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994), H.132

Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan Negara dan, secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Herbert McClosky seorang tokoh masalah partisipasi berpendapat bahwa: partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dari proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum (*the term political participation will refer to those voluntary activities by which members of a society share in the selection of rules and, directly or indirectly, in the formation of public policy*).

Dari penjelasan tersebut, jelaslah bahwa partisipasi politik erat sekali kaitannya dengan kesadaran politik, karena semakin sadar bahwa dirinya diperintah orang kemudian menuntut diberikan hak bersuara dalam penyelenggaraan pemerintah. Ada pula berpendapat bahwa partisipasi politik hanya mencakup kegiatan yang bersifat positif. Akan tetapi Huntington dan Nelson menganggap bahwa kegiatan yang ada unsur destruktifnya seperti demonstrasi, teror, pembunuhan politik dan lain-lain, merupakan suatu bentuk partisipasi. Teori partisipasi berkaitan dengan skripsi ini karena penulis meneliti mengenai *affirmative action* partai dalam pencalonan politisi perempuan anggota DPRD Kota Makassar dimana perempuan ikut serta secara aktif dalam perpolitikan Negara.¹²

¹² Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 2008). H.367

2. Teori gender dan feminisme

Istilah gender diterjemahkan dari bahasa ingris yang diartikan sebagai jenis kelamin. Sejumlah penulis tentang hal ini membedakan antara kata *gender* dan kata *seks* (jenis kelamin). Pengertian jenis kelamin merupakan pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang di tentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Jenis kelamin laki-laki identik dengan otonom, independen, ambisi, agresif, mampu mengontrol keadaan, sementara perempuan identik dengan keterikatan, independen, berkorban, pengasuh anak, dan segala hal yang berkaitan dengan kelemahan lembut.

Istilah gender terkadang disamakan dengan perempuan, penyamaan antara gender dan perempuan disebabkan oleh keadaan dimana pihak yang paling banyak menyuarakan kepentingan perempuan adalah kaum perempuan. Penyamaan gender dan perempuan dipandang tidak memiliki dasar yang kuat, bahkan dipandang menyesatkan, karena definisi gender bukanlah perempuan sebagaimana telah disebutkan diatas.

Dalam konteks ini, dapat dimaknai bahwa gender sebagai suatu konstruksi sosial yang menjelaskan pola hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga dan masyarakat yang itu dibentuk melalui proses social dan sosialisasi untuk memberikan definisi apa itu gender, kementerian EPW (1994) mendefinisikan gender sebagai hubungan dalam bentuk pembagian kerja serta alokasi peran, kedudukan, dan tanggung jawab serta kewajiban, dan pola hubungan yang berubah dari waktu ke

waktu dan berbeda antara budaya.¹³ Berdasarkan definisi kementerian perempuan tersebut menunjukkan bahwa gender terkait dengan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan misalnya laki-laki mencari nafkah untuk keluarga, perempuan berperan sebagai isteri dan ibu rumah tangga yang bertugas mengasuh anak, memasak, dan melakukan pekerjaan rumah.

Feminisme suatu kesadaran akan adanya penindasan dan ketidakadilan terhadap perempuan dalam masyarakat, serta adanya tindakan secara sadar yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang baik perempuan ataupun laki-laki, untuk mengubah keadaan tersebut.¹⁴

Dalam buku *Encyclopedia of Feminism*, yang ditulis Lisa Tuttle pada tahun 1986, feminisme dalam bahasa Inggrisnya *feminism*, yang berasal dari bahasa Latin *femina* (*woman*), secara harfiah artinya “*having the qualities of females*”. Istilah ini awalnya digunakan merujuk pada teori tentang persamaan seksual dan gerakan hak-hak asasi perempuan, menggantikan *womanism* pada tahun 1980-an. Adalah Alice Rossi yang menelusuri penggunaan pertama kali istilah ini tertulis, yaitu dalam buku “*The Athenaeum*”, pada 27 April 1989.

Feminisme yang memiliki artian dari *femina* tersebut, memiliki arti sifat keperempuanan, sehingga feminisme diawali oleh persepsi tentang ketimpangan posisi perempuan dibanding laki-laki di masyarakat. Akibat persepsi ini, timbul berbagai

¹³Syarifuddin Jurdi, *Kekuatan-Kekuatan Politik Indonesia*, (Makassar:PT Gramasurya Yogyakarta,2015), H.211

¹⁴Musdah Mulia, *Menuju Kemandirian Politik Perempuan*,(Yogyakarta: kibar press, 2008), .H.1

upaya untuk mengkaji penyebab ketimpangan tersebut untuk mengeliminasi dan menemukan formula penyetaraan hak perempuan dan laki-laki dalam segala bidang, sesuai dengan potensi mereka sebagai manusia (*human being*). Maggie Humm dalam bukunya “*Dictionary of Feminist Theories*” menyebutkan feminisme merupakan ideologi pembebasan perempuan karena yang melekat dalam semua pendekatannya adalah keyakinan Arimbi Heroepoetri dan R.“Feminisme bahwa perempuan mengalami ketidakadilan disebabkan jenis kelamin yang dimilikinya. Bagi Bahsin dan Night dalam bukunya “*Some Question of Feminism and its Relevance in South Asia*” pada tahun 1986 mendefinisikan feminisme sebagai suatu kesadaran akan penindasan dan pembedaan terhadap perempuan dimasyarakat, tempat kerja, dan keluarga,serta tindakan sadar oleh perempuan dan laki-laki untuk mengubah kesadaran tersebut.

Maka hakikat dari feminisme masa kini adalah perjuangan untuk mencapai kesetaraan, harkat, serta kebebasan perempuan untuk memilih dalam mengelola kehidupan dan tubuhnya, baik didalam maupun diluar rumah tangga. Pemikiran Kamla Bashin dan Nighat Said Khan terhadap feminisme tersebut tentunya memiliki alasan kuat, sebab keduanya menyaksikan banyak perempuan tertindas dalam berbagai hal dalam masyarakatnya sejak berabad-abad.

Sebagian dari perempuan mengalami langsung penindasan terhadap dirinya, mungkin oleh tradisi yang mengutamakan laki-laki, mungkin sikap egois dan sikap macho laki-laki, mungkin oleh pandangan bahwa perempuan adalah objek seks. Sehingga dari kesemua kemungkinan tersebut telah melahirkan penindasan terhadap

perempuan”. Berkaitan dengan skripsi ini, pemenuhan kouta 30% yang telah dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), menjadi landasan utama mengapa feminisme dikaitkan pada skripsi ini, sehingga perempuan bisa mendapatkan keadilan dan kesetaraan khususnya dibidang politik.¹⁵

3. Rekrutmen politik

Rekrutmen politik merupakan seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya. Fungsi rekrutmen merupakan kelanjutan dari fungsi mencari dan mempertahankan kekuasaan. Selain itu, fungsi rekrutmen politik sangat penting bagi kelangsungan sistem politik sebab tanpa elite yang mampu melaksanakan peranannya, kelangsungan hidup sistem politik akan terancam. Partai politik di Indonesia masing-masing memiliki cara sendiri untuk merekrut kaderkader dalam keanggotaan struktur partai politik. Selain itu setiap partai politik merekrut untuk dijadikan dalam keanggotaan di kursi parlemen.

Parpol merekrut berdasarkan aturan-aturan yang dimiliki oleh parpol tersebut yang berkaitan dengan perekrutan, baik keanggotaan struktur harian parpol maupun keanggotaan dalam penentuan daftar calon tetap anggota legislatif. Dasar penguat dari suatu partai politik yaitu memiliki keanggotaan yang kuat dalam hal ini dimaksudkan bahwa jumlah anggota yang dimiliki parpol semakin banyak maka dasar kekuatannya pun juga kuat. Selain itu, untuk dapat menjalankan fungsi parpol

¹⁵ www.sttaletheia.ac.id/wp-content/.../08/feminis-radikal.jurnal, pdf, diakses 11-04-2016

secara maksimal harus memiliki kursi di parlemen baik daerah, provinsi, maupun pusat. Seperti halnya di Indonesia rekrutmen politik dilihat dari perilaku pemilih (*bhvioralisme*). Pada teori rekrutmen ini, partai PDIP dan partai PPP memilih para calon kandidat perempuan untuk bersaing mendapatkan kursi di legislatif demi pemenuhan kouta 30%.¹⁶

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis penelitian

Dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif, Metode penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu dan atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan menganalisis data secara induktif mulai dari partisipan menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data. Penulisan deskriptif merupakan penggambaran suatu fenomena sosial dengan variable pengamatan secara langsung yang sudah ditentukan secara jelas dan spesifik. Penulisan deskriptif dan kualitatif lebih menekankan pada keaslian sebagaimana adanya dilapangan atau dengan kata lain menekankan kenyataan yang benar-benar terjadi pada suatu tempat. . dengan jenis penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran

¹⁶ Syamsuddin Haris, *Pemilu Langsung Oligarki Partai*,(Jakarta, Gramedia Pustaka Utama 2005), H.338

upaya/bentuk *affirmative action* partai dalam pencalonan politisi perempuan anggota DPRD dari komparasi PPP dan PDIP di kota Makassar.

2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang dilakukan penulis adalah di Dewan Pimpinan Cabang kantor (DPC) PPP dan kantor (DPC) PDIP di kota Makassar.

3. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang relevan, terstruktur dan tepat penulis menggunakan prosedur pengumpulan data sebagai berikut

1. *Library research* yaitu cara pengumpulan data dengan melalui penelusuran buku, jurnal, surat kabar atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Adapun teknik yang digunakan adalah sebagai berikut:¹⁷

(a) Kutipan langsung yaitu penulis mengutip isi buku yang relevan dengan materi penulisan dengan tidak mengubah redaksi baik huruf maupun tanda bacanya.

(b) Kutipan tidak langsung yaitu penulis mengutip hasil bacaan dengan berbeda konsep aslinya, namun tidak merubah makna dan tujuan dalam bentuk ikhtisarnya.

2. *Field research* yaitu metode pengumpulan data dengan mengadakan penelitian secara langsung kepada objek penelitian yang telah ditentukan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui tiga cara yakni wawancara, observasi dan dokumenter :

¹⁷John W.Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed*, (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2009), H.4

- (a) Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indra mata sebagai alat bantu utamanya selain panca indra lainnya seperti telinga, penciuman, mulut dan kulit. Dengan menggunakan panca indra tersebut dapat memperoleh data yang diinginkan dan lebih lanjut menyangkut pengambilan keputusan dari sistem yang diinginkan.
- (b) Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarai dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, di mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. Dengan mewawancarai salah satu informan dapat memberikan informasi mengenai sejarah, ataupun masalah-masalah dari *affirmative action* hingga terpenuhinya kouta 30%.¹⁸
- (c) Dokumenter Metode dokumenter adalah informasi yang disimpan atau didokumentasi sebagai bahan dokumenter. Alat ini untuk pengumpulan data melalui camera dan handphone. Berguna mengumpulkan data bagi penulis dilapangan. Merekam pembahasan yang dijelaskan oleh informan mengenai *affirmative action* untuk memenuhi kebutuhan informasi penulis.

3. Metode pendekatan

¹⁸Burhan Bungin , *penelitian kualitatif, Komunikasi, Ekonomi ,Kebijakn Publik dan Ilmu Sosial*. (Jakarta:Kencana Prenada Media Group,2007),hal 56

a. Pendekatan historis, yaitu suatu ilmu yang membahas beberapa peristiwa dengan memperhatikan unsur tempat, waktu, obyek, latar belakang serta pelaku peristiwa tersebut. Dan untuk mengetahui latar belakang atau sejarah *affirmative action* yang berasal dari Amerika Serikat yang pernah mengalami diskriminasi ras.

b. Pendekatan teologis yaitu memahami perkembangan agama dengan kerangka ilmu ketuhanan dengan berlandaskan pada Al-Quran dan Hadist. Seperti yang dibahas dalam Al-Quran mengenai perempuan dan politik dan mengenai perempuan dan kekuasaan.

D. Teknik analisis data

Untuk menganalisa berbagai fenomena di lapangan. Penulis melakukan teknik analisis data melalui deskriptif analisis. Selain itu penulis menggunakan metode komparasi yang membandingkan partai PDIP dan PPP. Adapun tujuan studi komparatif yaitu:

a. Untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu.

b. Untuk membuat generalisasi tingkat perbandingan berdasarkan cara pandang atau kerangka berfikir tertentu.

c. Untuk bisa menentukan mana yang lebih baik atau mana sebaiknya dipilih

Dalam penelitian ini, penulis akan membandingkan calon politisi perempuan dari partai PDIP dan PPP yang berhasil duduk di DPRD kota Makassar dan tidak berhasil untuk duduk di DPRD kota Makassar. Dari partai PDIP sudah memenuhi kuota 30% seperti yang telah ditetapkan oleh KPU, dan mendapatkan satu kursi

di DPRD kota Makassar. sedangkan dari partai PPP melebihi dari kouta 30%.

Akan tetapi tidak satupun yang berhasil duduk di DPRD.



GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

1. Letak Geografis

24

Menurut Badan Pusat Statistik Kota Makassar bahwa jumlah kecamatan di kota Makassar sebanyak 14 kecamatan dan memiliki 143 kelurahan. Diantara kecamat-an tersebut, Mariso, Mamajang, Tamalate, Rappocini, Makassar, Ujung Pandang, Wajo, Bontoala, Ujung Tanah, Tallo, Panakukkang, Manggala dan Biringkanaya. Sedangkan yang berbatasan dengan pantai yaitu kecamatan Tamalate, Mariso, Wajo, Ujung Tanah, Tallo, Tamalanrea dan Biringkanaya.

1. Penduduk

Penduduk Kota Makassar umumnya beretnis mayoritas beragama islam. Makassar merupakan kota yang multi etnis. Penduduk Makassar kebanyakan dari (Suku Makassar) dan Suku Bugis sisanya berasal dari suku Toraja, Mandar, Buton, Tionghoa, Jawa dan sebagainya. Ada pun jumlah penduduk di Kota Makassar, berdasarkan Badan Statistik Kota Makassar 2011-2013 di bawah ini;

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jumlah Perempuan Dan Laki-Laki
2012-2013

Kecamatan	2012		2013	
	Laki-laki	perempuan	Laki-laki	Perempuan
Mariso	28.165	28.359	28.333	28.245
Mamajang	28.892	30.278	28.405	29.682
Tamalate	87.551	89.396	90.595	92.344
Rappocin	74.811	79.373	75.948	80.717
Makassar	40.400	41.672	40.056	40.998

Ujung Pandang	12.829	14.372	12.498	13.988
Wajo	14.410	15.220	13.453	14.103
Bontoala	26.580	27.935	25.667	26.964
Ujung Tanah	23.597	23.532	23.519	23.317
Tallo	67.504	67.279	69.327	69.092
Panakukkang	70.439	71.869	71.749	73.248
Manggala	61.386	61.453	65.512	65.431
Biring kanaya	88.297	88.819	97.410	98.496
Tamalanrea	51.882	53.352	53.623	55.361
Jumlah	676.744	692.862	696.086	711.986

Sumber: Badan Statistik Kota Makassar

Data diatas berisi mengenai data jumlah rumah tangga berdasarkan bukti kepemilikan rumah per kecamatan Mariso sampai Kecamatan Tamanlarea yang terdiri dari 143 kelurahan di Kota Makassar tahun 2012-2013 yang dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin. Dan jumlah penduduk pada tahun 2012 sebesar 1.369.606 jiwa sedangkan jumlah penduduk pada tahun 2013 sebesar 1.408.072 jiwa. Kota Makassar juga memiliki tingkat pendidikan seperti Universitas Hasanuddin, Universitas Negeri Makassar dan Universitas Islam Negeri Alauddin. Ini membuktikan bahwa Kota Makassar setara dengan kota-kota besar di Indonesia.

2. Budaya

Kota Makassar memiliki adat-istiadat yang cukup beragam salah satunya dalam bentuk bahasa yang digunakan sehari-hari yaitu bahasa bugis Makassar. Bugis merupakan kelompok etnik dengan wilayah asal Sulawesi Selatan. Bahasa bugis yang tersebar di Kabupaten Maros, Takalar, Jenepono, Luwu, Bone, Majene, Pare-pare, Sidrap, Wajo dan sebagainya. Dan nama panggilan gelar bugis juga berbeda-beda seperti Daeng, Puang, Karaeng dan lainnya. Kota Makassar sendiri biasa menggunakan gelar tersebut dengan sebutan “Daeng”. Budaya bugis ini berasal dalam lontara. Begitulah budaya Kota Makassar hingga sampai saat ini.

3. Perekonomian

Perekonomian Kota Makassar sangat maju dibandingkan kabupaten atau kota yang ada di Sulawesi Selatan. Dikarenakan bahwa Kota Makassar adalah terletak paling strategis dari kota lain dan juga pusat perdagangan terbesar di Sulawesi Selatan. Misalnya, memiliki pasar daerah yang banyak, toko-toko modern dan lain sebagainya.

Dari sisi kelautan Kota Makassar mempunyai pelabuhan dimana hasil-hasil laut dikelola seperti ikan-ikan hasil tangkapan para nelayan dan kapal-kapal yang berasal dari Jawa membawa barang untuk diperdagangkan di Kota Makassar, sedangkan dari sisi udara terdapat pesawat yang membawa dagangan dari beberapa pulau dan negara-negara tetangga.

Makassar juga memiliki beberapa pabrik-pabrik, yakni pabrik minuman dan makanan ringan. Salah satu contohnya pabrik minuman markisa, pabrik roti, pabrik tahu dan tempe dan lain sebagainya. Penduduk Kota Makassar yang sangat padat

membuat penduduk dari kota atau kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan menjual beberapa hasil pangan, beras dan buah-buahan.

B. Gambran umum partai PPP

Partai persatuan pembangunan (PPP) didirikan tanggal 5 januari 1973. Sebagai hasil fursi politik empat partai islam. Yaitu partai Nahdatul Ulama. Partai muslimin Indonesia, dan partai islam perti¹⁹. Fungsi ini menjadi sumber kekuatan PPP yaitu partai yang mampu mempersatukan berbagai fraksi dan kelompok dalam islam untuk itulah wajar jika, PPP kini memperoklamasikn diri sebagai “Rumah besar ummat Islam” PPP didirikan oleh lima deklarator yang merupakan pimpinan empat partai islam pserta pemilu 1971 dan seorang ketua kelompok persatuan pembangunan, semacam fraksi empat partai islam di DPRD para deklarator itu adalah:

- KH Idham Chalid ketua umum PB Nahdatul Ulama
- H.Mohammad Syafaat Mintaredja, SH Ketua Umum Partai Muslimin Indonesia
- H. Rusli Halil Ketua umum Partai Islam Perti dan
- H.Mansyur, Ketua kelompok Persatuan Pembangunan di fraksi DPR

PPP berasaskan Islam dan berlambangkan Ka’bah. Akan tetapi dalam perjalanannya, akibat tekanan politik kekuasaan orde baru, PPP pernah menaggakan asas Islam dalam menggunakan asas Negara Pancasila sesuai dengan sistem politik dan perarturan

¹⁹ Taufik, Elektabilitas Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada pemilu 2014 di DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta 2014), pdf, H2

perundangundagn yang berlaku sejak tahun 1984 pada mukhtamar 1 PPP tahun 1984 PPP secara resmi menggunakan asas Pancasila dan lambang partai berupa bintang dalam segi lima. Pada mukhtamar 1 partai persatuan pembangunan tahun 1984 partai persatuan pembangunan secara resmi menggunakan asas pancasila dan lambang partai berupa bintang dalam segi lima PPP memakai ideologi nasional tersebut berlangsung tidak terlalu lama seiring tumbangnya orde baru yang ditandaidengan lengsernya Presidegunan kembalimenggunakan asas Islam, dan lambang ka'bah. Hal itu secara resmi dilakukakn melalui mukhtamar IV akhir tahun 1998. Soeharto tanggal 21 Mei 1998 dan digantikan oleh Wakil Presiden B.J Habibie, bersamaan dengan hal itu, kemudian partai persatuan pemb "Tujuan PPP adalah terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, sejahtera lahir batin dan demokratis dalam wadah Negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dibawa Ridha Allah swt.²⁰

Ketua umum DPP PPP yang pertama adalah H. Mohammad Syafaat Mintradja. SH yang menjabat sejak tanggal 5 januari 1973 satai persatuan sampai tahun 1978. Selain jabatan ketua umum pada awal berdirinya PPP juga mengenal presidium partai yang terdiri dari KH. Idham Chalid sebagai presiden partai H.Mohammad Syafaat mintaredja. SH, DRS.H.TH.M.Gobel, Haji Rusli Halil dan Masykur masing-masing sebagai wakil presiden.

²⁰Taufik, Elektabilitas Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Pada Pemilu 2014 Di DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta2014), pdf, H.3

Ketua umum DPP PPP yang kedua adalah H. jalani Naro, SH. Dia menjabat dua priode pertama tahun 1978 ketika Mohammad Syafaat mengundurkan diri sampai diselenggarakannya Mukhtamar 1 PPP tahun 1984. Dalam Mukhtamar 1 itu Naro terpilih lagi menjadi ketua umum DPP PPP.

Ketua umum DPP PPP yang ketiga adalah H. Ismail Hasan Materium, SH yang menjabat sejak terpilih dalam Mukhtamar 11 PPP tahun 1989 dan kemudian terpilih kembali daam Mukhtamar 111 tahun 1994.

Ketua umum DPP PPP yang keempat H. Hamzah Haz yang terpilih dalam Mukhtamar 1V tahun 1998 dan kemudian terpilih kembali dalam Mukhtamar V tahun 2003. Hasil Mukhtamar V juga menetapkan jabatan wakil ketua umum pimpinan harian pusat DPP PPP yang dipercayakan mukhtamar kepada mantan sekjen DPP PPP H. Alimarwan Hanan. SH

Ketua umum DPP PPP kelima adalah H. ShuryaDhama Ali yang terpilih dalam Mukhtamar V1 tahun 2007 dengan sekretaris jendral H.Irgan Chairul Mahfiz sedangkan wakil ketua umum dipercayakan oleh mukhtamar kepada DRS. HA. Chozin Chumaidy H. Suryahdharma Ali kemudian terpilih kembali menjadi ketua umum Masa Bakti 2011-2015 melalui Muktamar V11 PPP 2011 di Bandung.

C. Gambaran umum partai PDIP

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) merupakan salah satu kekuatan politik besar yang ada di Indonesia. Dua kali Pemilu pasca Orde Baru yang digelar pada 1999 dan 2004 menunjukkan partai ini memiliki basis massa dan dukungan yang kuat. Besarnya dukungan ini tercermin dengan perolehan suara yang cukup

signifikan dalam dua kali pemilu yang diselenggarakan pasca Orde Baru PDI Perjuangan merupakan partai politik yang sebenarnya adalah partai yang secara langsung memiliki tali kesejarahan dengan partai politik masa orde lama. PDI Perjuangan sebenarnya kelanjutan dari partai Demokrasi Indonesia itu lahir dari lima partai kelima partai tersebut adalah.

1. Partai Nasional Indonesia (PNI)

Didirikan Bung Karno tanggal 4 juli 1927 di Bandung. Dengan mengusung nilai-nilai dan semangat nasionalisme, PNI kemudian berkembang pesat dalam waktu singkat.

- Partai Kristen Indonesia (Parkindo)

Parkindo adalah partai yang didirikan karena ada maklumat pada waktu itu, ia baru berdiri tahun 1945 tepatnya pada tanggal 18 november 1945 yang diketuai DS Probowindo.

- Partai katolik

Partai katolik lahir kembali pada tanggal 12 Desember 1945 dengan nama PKRI (partai katolik Indonesia) merupakan kelanjutan dari atau sempalan dari katolik jawi, yang dulunya bergabung dengan partai katolik sebenarnya partai ini pada tahun 1917 itu sudah ada. Partai ini didirikan oleh umat katolik jawa tengah.²¹

- Ikatan pendukung Kemerdekaan Indonesia

IPKI adalah partai yang didirikan trutama oleh tentara. IPKI sejak lahirnya mencanangkan pancasila, semangat proklamasi dan UUD 1945 sebagai cirinya. Tokoh

²¹ Budi Priyanto, Palembangang Politik PDIP Jateng, *tesis* 2009,H 2

di balik pendirian IPKI adalah A.H Nasution kelahirannya didasari oleh UU NO.7 tahun 1953 tentang pemilu 1995. Dalam pemilu itu anggota ABRI aktif dapat dipilih melalui pemilu dan duduk di konstituante.

- Murba

Murba didirikan pada tanggal 7 november 1948 setelah Tan Malaka keluar dari penjara. Murba adalah gabungan partai rakyat jelata dan partai Indonesia Buruh Merdeka.²²

Setelah melalui proses yang panjang akhirnya pada tanggal 10 januari 1973 tepat jam 24:00 dalam pertemuan majelis permusyawaratan kelompok pusat yang mengadakan pembicaraan sejak 20:30 di kantor sekretariat PNI di jalan Salemba Raya 73 jakarta, kelompok demokrasi dan Pembangunan melaksanakan fusi 5 partai politik menjadi satu wadah partai yang bernama partai Demokrasi Indonesia meskipun pada awal fusi sebenarnya muncul tiga partai nama untuk fusi menjadi.

- Partai Demokrasi
- Partai Demokrasi Pembangunan
- Partai Demokrasi Indonesia

Kongres 11 PDI perjuangan akhirnya berakhir pada tanggal 31 maret 2005 setelah Megawati dikukuhkan sebagai ketua umum terpilih karena seluruh peserta dalam pemandangan umumnya mengusulkan Megawati menjadi ketua Umum DPP

²² Budi Prayitno, Pelembagaan Politik PDIP Jateng, *Tesis* 2009, H. 4

PDI perjuangan priode 2005-2010. Kuatnya posisi Megawati tidak hanya dalam anggota Pilkada tetapi juga dalam penentuan daftar calon legislative.



BAB III

PEMBAHASAN

Perempuan sebagai manusia mempunyai hak untuk memperoleh kehidupan bebas dan eksistensi sebagai perempuan untuk dapat sejajar dengan laki-laki, namun hak perempuan masih belum berjalan secara maksimal masih terdapat problem diantaranya praktik 30% keterwakilan perempuan belum diterapkan terutama oleh partai politik. Peluang perempuan juga untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional sesungguhnya telah terakomodasi oleh berbagai kebijakan dan peraturan dan perundang-undangan. Pasal 27 ayat 1 undang-undang dasar Negara Republik Indonesia telah mengamanatkan bahwa warga Negara bersama kedudukannya, dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya.

Ungkapan ‘setiap warga Negara’ dalam ketentuan tersebut diatas tentu saja berarti warga Negara laki-laki maupun perempuan. Walaupun tidak dinyatakan secara eksplisit, berdasarkan ketentuan pasal 27 tersebut dapat diartikan pula bahwa UUD 1945 sudah menganut prinsip nondiskriminatif. Dengan prinsip non diskriminatif tersebut, maka perempuan sebagai warganegara dapat dikatakan memperoleh peluang yang sama dengan laki-laki dalam pemerintahan.

Dalam bab ini akan dipaparkan hasil penelitian “*Affirmative Action* Partai Dalam Pencalonan Politisi Perempuan Anggota DPRD Kota Makassar (Studi Komparasi Partai PPP Dan PDIP Kota Makassar) sesuai dengan rumusan masalah

yaitu Bagaimana upaya yang dilakukan oleh PDIP dan PPP dalam mempercepat kesetaraan gender pada pencalonan politisi perempuan kota Makassar priode 2014-2019 dan apa faktor penghambat *affirmative action* perempuan PPP dan PDIP pada pencalonan politisi legislatif perempuan kota Makassar priode 2014-2019.

A. Upaya yang dilakukan oleh PDIP dan PPP dalam mempercepat kesetaraan gender pada pencalonan politisi kota Makassar priode 2014-2019

Peran perempuan dalam ranah politik di Indonesia bisa dikatakan masih minim. Berbagai upaya pembangunan nasional yang selama ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik perempuan maupun laki-laki. Bahkan belum cukup efektif memperkecil kesenjangan yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa hak-hak perempuan memperoleh manfaat secara optimal belum terpenuhi sehingga pembangunan nasional belum mencapai hasil yang optimal. Faktor penyebab kesenjangan gender yaitu tata nilai sosial budaya masyarakat, untuk mampu berperan dan menggunakan seoptimal mungkin kesempatan yang tersedia pada abad ke 21 ini, perempuan dituntut untuk memiliki sifat yang mandiri.

Profil perempuan Indonesia saat ini digambarkan sebagai manusia yang harus hidup dalam situasi dilematis. Disatu sisi perempuan Indonesia dituntut untuk berperan dalam semua sector, tetapi disisi lain muncul pula tuntutan lain agar perempuan tidak melupakan kodrat mereka sebagai perempuan. Contohnya situasi tersebut dialami oleh perempuan Indonesia yang berkarir. Disatu sisi merasa terpanggil mendarmabaktikan bakat dan keahliannya bagi Bangsa dan Negara disisi

lain mereka dihantui opini masyarakat bahwa perempuan karir sebagai salah satu ketidakberhasilan pendidikan terhadap anak mereka.²³

A.1.Upaya yang dilakukan oleh PDIP dalam mempercepat kesetaraan gender pada pencalonan politisi perempuan kota Makassar priode 2014-2019

Keterlibatan perempuan dalam politik dan pemerintahan merupakan suatu anugrah bagi berkelanjutan suatu Negara. Posisi-posisi stereotipe yang terbuka bagi perempuan Meskipun dalam tahun-tahun terakhir ini banyak perempuan yang aktif di ranah publik, tapi masih ada stereotipe dari posisi- posisi pekerjaan yang dianggap sesuai buat perempuan. Keterlibatan perempuan di pemerintahan, birokrasi, partai politik atau sektor swasta, seringkali diartikan sebagai bentuk perluasan dari peran dan posisi di ranah domestik.

Tidak banyak yang mempersoalkan jika pekerjaan perempuan yang dianggap khas. Mereka dituntut dengan kualifikasi yang tinggi untuk dikatakan memang layak sebagai seorang pemimpin. Misalnya disini yang dilihat adalah latar belakang pendidikannya, kinerja profesionalitasnya, atau keaktifannya diberbagai organisasi, baik sosial-politik maupun ekonomi. Belum lagi mereka selalu dilihat sebagai model ideal seorang perempuan, istri dan ibu yang bisa membagi waktu,pandai, figur publik tapi tetap tidak lupa kodratnya di rumah. Mereka juga biasanya diharapkan untuk bisa membuat perubahan besar khususnya dirana politk.

Seperti yang diungkapkan oleh H.Munir selaku anggota fraksi dari PDIP.

²³ Vera A.R Pasaribu, *Kesetaraan dan Keadilan Gender,2006*, pdf HKBP Nomenseen H. 8

“yang pertama kita lakukan itu pada pencalonan sesuai dengan amanah perempuan yaitu kouta perempuan 30% juga, dalam perekrutan caleg kemarin, bahkan kita tes yang dilakukan oleh partai kami, sehingga ada beberapa yang dilakukan untuk mendapatkan bukan cuman kuantitas tapi juga kualitas dari pada calon legislatif, ada beberapa caleg kita yang sangat menonjol bahkan ada dari caleg perempuan sehingga bisa mendapatkan satu kursi di dapil 5. Memang kita sudah, menjadi suatu aturan dipartai kami, bahkan bisa melebihi dari 30% berhubung ketua partai kami sendiri seorang kaum hawa ibu Mega sendiri sehingga dalam hal kesetaraan gender itu sangat diutamakan, bahkan pelatihan-pelatihan khusus kita lakukan untuk perempuan seperti halnya memberikan pelatihan keperempuanan seperti memasak dan sebagainya itu dilakukan agar mereka bisa lebih kompeten dan memfokuskan dibidangnya masing-masing nanti ketika mereka terpilih di parlemen.”²⁴

Dalam pengumpulan politik, sebenarnya perempuan bisa melakukan apa saja dengan kualitas yang dimilikinya. Perempuan mampu menjadi pemimpin dan tingkat kepala desa sampai presiden dan wilayah publik yang signifikan. Seperti yang di jelaskan dibuku Joni Lovenduski mengenai *politik berparas perempuan* penetapan strategi untuk meningkatkan perwakilan politik perempuan dalam demoksrasi modern merupakan suatu proses dimana ide-ide mengenai keadilan dijadikan dasar bagi kesamaan politik.

Pemerintah-pemerintah telah menandai advokasi perempuan disemua tingkat yang menyerukan persamaan keterwakilan perempuan dan laki-laki membuat persedian untuk menjamin bahwa kaum perempuan diangkat untuk Negara, menyingkirkan rintangan-rintangan hukum demi meningkatkan kesamaan perempuan dan menyediakan kursi di lembaga undang-undang.²⁵

²⁴ Wawancara dengan H.Munir selaku anggota DPRD kota Makassar, fraksi PDIP, selasa 18 juli 2016 pukul 10.35 wita

²⁵ Joni Lovenduski *Politik Berparas Perempuan*, (Yogyakarta Konsius 2008), H. 163-166

Berdasarkan Undang-Undang No 12 tahun 2003 pasal 65 ayat 1 tentang setiap partai politik dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi DPRD Kabupaten atau Kota di Indonesia dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%. Adanya peraturan tersebut dapat meningkatkan peran perempuan dimasyarakat. Undang-undang No.8 tahun 2012, bahwa daftar bakal calon anggota legislatif yang diajukan partai politik, memuat 30% keterwakilan perempuan yang konsekuensinya apabila partai politik tidak mematuhi, maka akan ada akibat hukum yang diberlakukan.

Menindaklanjuti ketentuan tersebut, KPU melalui peraturan No 7 tahun 2013, menegaskan kembali kewajiban pemenuhan syarat keterwakilan perempuan dalam daftar bakal calon legislatif yang diajukan parpol peserta pemilu.

Pertama, PKPU No. 7 tahun 2013 tentang aturan pencalonan DPR,DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.aturan ini menegaskan keharusan kouta perempuan sebanyak 30% disetiap daerah pemilihan. PKPU ini juga mengatur mengenai no.urut, dimana dalam setiap tiga bakal calon, harus ada satu nama calon perempuan.

Kedua, PKPU No. 15 tahun 2013 yang mengatur tentang pedoman kampanye. Menurut PKPU ini, baliho/spanduk tidak boleh memasang foto caleg, melainkan hanya gambar partainya saja. Selain itu, peraturan ini juga membatasi penggunaan alat peraga kampanye. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan mampu “melindungi” caleg perempuan karena ketidakmampuan mereka untuk melakukan publikasi besar-besaran.

Ketiga, PKPU No.17 tahun 2013 mengenai pelaporan dana kampanye. Dengan berubahnya sistem pemilihan berdasarkan no. urut, maka kontestasi politik di Indonesia “semakin liar”. Caleg tidak hanya bersaing di ranah “antar partai” melainkan juga “intra partai”. Peraturan ini diharapkan mampu membatasi dana kampanye. Caleg yang punya dana terbatas, diharapkan “tidak kalah” dengan para caleg kaya.

Dengan adanya peraturan tersebut, persamaan posisi dan kondisi yang adil bagi kelompok yang termarginalkan dan lemah akan membuka peluang bagi terpilihnya perempuan perempuan di lembaga legislatif. Terbukti dari 197 caleg perempuan yang bertarung dilima Daerah pemilihan (Dapil) di Kota Makassar hanya tujuh yang meraih suara signifikan dan melenggang ke parlemen.

Salah satu penyebabnya karena kemampuan caleg perempuan dalam membangun jejaring politik masih kurang dibanding caleg pria. Caleg perempuan tidak mampu mengikuti determinasi gerakan politik yang dilakukan caleg pria. Sehingga, seringkali kalah strategi dengan caleg pria.

Tabel 3.1
Distribusi Calon Anggota Legislatif Perempuan Kota Makassar bisa kita lihat dari lima dapil yang ada di Kota Makassar.

No	Dapil	Lokasi	Jumlah Caleg
1	I	<ul style="list-style-type: none"> - Makassar - Ujung Pandang - Rappocini 	107
2		<ul style="list-style-type: none"> - Kec. Bontoala - Kec. Tallo 	

	II	- Kec. Ujung Tanah - Kec. Wajo	119
3	III	- Kec. Biringkanaya - Kec. Tamalanrea	119
4	IV	- Manggala - Panakukkang	119
5	V	- Mamajang - Mariso - Tamalate	131

Sumber: KPU Kota Makassar 2014²⁶

Pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa distribusi calon legislatif perempuan yang ada di kota Makassar, yaitu pada dapil I, II, III, IV, V, jumlah caleg terendah berada pada dapil 1 yang meliputi Makassar, Ujung Pandang, dan Rapoccini dengan jumlah caleg 107. Sedangkan jumlah caleg tertinggi berada pada dapil V menempati Mamajang, Mariso, dan Tamalate dengan jumlah sebanyak 131.

Posisi perempuan dijelaskan pula dalam Islam bahwa manusia itu baik perempuan maupun laki-laki secara optimis dan positif, yaitu sebagai makhluk paling mulia dan bermartabat. Karena manusia memiliki posisi yang sangat spesifik, yakni berpotensi menjadi khalifah Tuhan (QS. Al-Baqarah, 2:30). Sebagai khalifah Tuhan, tugas manusia adalah menerjemahkan karya kreatif Tuhan di alam semesta. Karena itu, keunikan manusia baik perempuan maupun laki-laki adalah mewakili Tuhan di atas bumi ini. Suatu posisi yang sangat tinggi bahkan belum pernah diberikan kepada makhluk lainnya, termaksud malaikat sekalipun.²⁷

²⁶ Komisi Pemilihan Umum 2015

²⁷ Siti Musdah Mulia, *Menuju Kemandirian, Politik, Perempuan*, (Yogyakarta: Kibar Pres, 2008), H.110

Di Kota Makassar distribusi caleg perempuan belum merata ,dapat kita lihat dari data berikut :

Tabel 3.2

Daftar Caleg kota makassar berdasarkan partainya

NASDEM	Nuraeni Handaling	Baharia	Alines Pangiling
	A.nurhani Nurdin	Nurfalina	Nurmayana
	Ummu Calsum	Nurhaeda Arif	Desy Nita Sari
	Melani Simon	Hesty Rusli	Indira Mulyasari
	Megawati	Irmawati Usman	Megawati
	Rosnida Yusuf	Rahmaniar	
PKB	A.Ratnawati Rasyid	Rusiyanti Idris	Halimah
	Sitti Mirsa S	Sunaani	Sriyanti
	Haje Dana	Sufiani	Nur Setiawan
	Ramlah Ramli	Husniar	St.Farah Darika
	Rosmady Kurniansya	Faridha Yanthi T	A.Bunga Yuliant Y
	Nursinah	Indrawaty M	Hermawati
	Hafisah	Hamidah Husain	Meity Rahmatia
PKS	Rosdiana	Emmawaty	Yeni Rahman
	Darmawati	Rani	Astuti Syamsudddin
	Husny Hamzah	Adriani	Mukrimah
	Aisyah Majid	Sitti Salma	Ridhatullah Wahab
	Senahari	Haslinda	
	Susni Ambeta	Avalien Fransisca	Marhaeny
	Evy Makalew	Agustini Nurdin	A.Astriana M
PDIP	Eka Trisnawati	Endang Susilawati	Hermia Donna
	Yohanna Messie	A.Nabila Ansyari	Emi Kartini
	A.Vivin Sukmasari	Irma Ade Fitrawati	
	A.Lely Rizkah	Gustiyanti	Melani Mustari
	A.Ida Asni	A.Besse Ferial	Indriana Paerengi

GOLKAR	Nurwina Badaruddin	Sudarnia	Elly Riastuti
	Ratnapa	Yusnaeda Husain	Muhartini Yunus
	Astuti Kasim	Neng Indriyani	
GERINDRA	Prita Barlina S	Nurwina	Mariasari Prihartini
	Megawati Arruanling	Ratnapada	Indah Fajarwati
	Immastin	Herlinda Pati	Nurmalasari Yusuf
	A.Asni	Lisdayanti Sabri	Merryan Christine
	Kartini Galung	Sitti Sarlina Chalik	Sherlina Anggriany
	Dahniar		
DEMOKRAT	Ardiyani Rasyid	Rirny Iriani	Nurlinda Salengke
	Rosmala Dewi S	Made Sugiarti	Nurul Hidayat
	Yusdailah	Hamsiah Sangkala	Yuniar Tompo
	Fatmah Wahyuddin	Anita	Widji Kartini
	Rismawati ZK	Inin Septiani M	
PAN	Irmawati	A.Sitti Rahmatia	Jumriah
	Rasmi Ridjang Sikati	A.Khaerati	Sitti Nurbaya
	Rohani	Nursyam Amalia	Syuheria
	Nurmiah Sunusi	Iriani Bustami	Sitti Fatimah W
	Fadhilah S	Henni Haddayani	Hasnawaty S M
	A.Anny Nurningsih	Haslinda	
PPP	A.Aisya Tenriawaru	Sitti Nurliah	Eka Rahayu Wahab
	Retno Dianawati	Alfirah R	Herniawati
	Wardawati	Sitti Rosnawati	Mustari
	Nurfaedah	Sukma Taris	Nurhaedah
	Nasrawati	Zherly Anggriani	Evie Adriana
	Nurhayati	Rosvita Natsir Said	
	Halimah	Muslimah	Kristina Parinsi
	Usni	Rosmiati	Reski Indah Sari

HANURA	Puriva Wahid	Nur Ayu	Deisy Thursiana
	Nurmiati	A.Sri Rahayu	Viani Actavius
	Shinta Mashita M	Erma Suryani	Sherly
	Sri Wahyuni		
	Nurhasanah Irma H	Hasniah	Mustari Pata
PBB	Manzila Adriani	Nurhaena	A.Asnawati
	Asmira	Helmi Suarni	Suknawati Wahab
	Nurkalsum	Suriani	Rizki Maharani
	Rosnawati		
PKPI	Musdalifa Tajuddin	Sriyanti Amir	Audhianty Dwi T
	Gempita Anggun	Indar Kutau	Nivianus P
	Hasnawati	Hariyanti	Sulastri
	Yudriani	Julina S	

Sumber: Komisi Pemilihan Umum 2014

Perlu dicatat dengan baik bahwa sistem pemilihan umum, termaksud proses penentuan kandidat anggota DPR belum sepenuhnya berpihak pada perempuan. Oleh karena itu, yang perlu diperbaiki sebetulnya bukan hanya sistem pemilu, melainkan juga sistem kepartaian.²⁸ Salah satu faktor minimnya jumlah caleg perempuan yang terpilih di Pileg kali ini karena ruang gerak mereka terbatas dibanding caleg pria. Pemilu kali ini belum bisa menggantikan hegemoni caleg pria.

Cost politik yang cukup besar menjadi hambatan untuk meraih suara signifikan. keterlibatan perempuan di dunia politik sedikit banyak saat ini sudah bisa diterima, atau sedikitnya dilihat sebagai sesuatu yang wajar, tetapi pada dasarnya perempuan tidak menikmati kesempatan yang sama dibandingkan laki-laki. Sejauh ini keterwakilan perempuan dalam posisi-posisi ke pimpinan masih sangat terbatas hanya pada tingkat otoritas menengah dan bawah. Sedangkan untuk masuk ke tingkat atas masih sangat sukar. Berbagai peraturan legislatif atau juga diberlakukan sistem

²⁸ Siti Musdah Mulia *Menuju Kemandirian Politik Perempuan*, H. 91

kuota diberbagai negara memang membantu perempuan untuk berkiprah dalam dunia politik, tapi ini sebetulnya masih belum memadai dan yang sangat diperlukan adalah “kehendak Politik (*Political Will*)” yang kuat dari pemerintah, partai politik dan organisasi lainnya untuk menciptakan sebuah lingkungan politik yang kondusif bagi partisipasi atau pemberdayaan politik perempuan.

Seperti halnya juga yang dikatakan oleh vivin sukmasari selaku perwakilan dari PDIP yang satu-satunya lolos ke DPRD kota Makassar dan sempat menjadi ketua fraksi PDIP pada priode lalu, mengenai upaya yang dilakukan oleh PDIP dalam mempercepat kesetaraan gender pada pencalonan politisi perempuan kota Makassar

“upaya yang kita lakukan khususnya di partai kami, dalam mempercepat kesetaraan gender tentunya memperbanyak kader perempuan, artinya supaya potensi yang kita lakukan semakin besar, dan bisa bertarung dipilkada berikutnya dengan merekrut perempuan yang ada di kota Makassar tentunya yang memiliki potensi dan akrebilitas dibidang politik. Karna bukan hanya di partai kami tapi di partai lain juga berfikir apa bila kita hanya merekrut atau melantik tanpa melihat potensi dan kualitas dari calon sama saja kita tidak biasa melakukan atau menjalankan apa yang menjadi tujuan kita dari awal khususnya dibidang perempuan. Ada beberapa bagian dari wilayah politik yang tidak memungkinkan laki-laki untuk memasuki wilayah tersebut. selain dari pada itu kita juga melakukan beberapa kegiatan, keterampilan awalnya kita tidak melihat dulu secara langsung sdm mereka, setelah itu dibuatkan kegiatan mengenai hal perempuan khususnya seperti kegiatan menjahit, dan memasak dari kegiatan tersebut, kita bisa mengambil berbagai keuntungan yang pertama, dari kegiatan untuk melatih bagaimana cara memfokuskan kinerja perempuan dibidangnya masing-masing sehingga nantinya, akan tidak sulit untuk perempuan mengatasi masalah dibidangnya, dan yang ke dua, dari kegiatan tersebut kita secara tidak langsung mengajak orang-orang untuk memilih di partai kami.”²⁹

Seperti yang dijelskan dibuku *Menuju Kemandirian Politik Perempuan* Oleh sebab itu, perempuan sebagai warga Negara perlu mengaktualisasikan diri dengan

²⁹ Wawancara Vivin Sukmasari anggota DPRD, mantan ketua fraksi PDIP, 22 juli 2016, 12.45 wita

berpartisipasi dalam lembaga politik. Aktualisasi diri perempuan selanjutnya harus dibangun dalam seluruh aspek kehidupan publik. Semua kebijakan publik yang dikeluarkan oleh lembaga politik pada akhirnya akan berdampak pada semua warga Negara. Perempuan perlu menempatkan diri pada lembaga politik untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Sebab, tanpa melibatkan aspirasi perempuan dalam berbagai kebijakan publik akan melahirkan kebijakan publik yang tidak pro perempuan atau peraturan yang diskriminatif terhadap perempuan.

A.2. Upaya yang dilakukan oleh PPP dalam mempercepat kesetaraan gender pada pencalonan politisi perempuan kota Makassar periode 2014-2019

Tindakan *affirmative action* terhadap perempuan merupakan sebagai suatu pemahaman terhadap persoalan politik perempuan yang intinya bukan untuk menguasai, saling menjajah atau saling menjegal. Tujuan utamanya adalah membuka peluang terhadap perempuan agar mereka sebagai kelompok yang marginal bisa terintegrasi dalam kehidupan publik secara adil. *Affirmative action* dapat dijadikan sebagai alat penting untuk mempertahankan paling tidak 30 % perempuan agar tetap berada pada tingkat pembuatan keputusan sehingga bisa meminimalisir aturan-aturan yang tidak sah untuk mencapai kesetaraan gender.

Sesuai yang disampaikan juga oleh bapak Dr.H.Humphrey R.Djamat bahwa :

“Didalam partai PPP kita selalu menerapkan hal untuk memberikan kesan positif dalam sebuah kegiatan politik, tak terkecuali untuk calon legislatif perempuan partai PPP.sebelumnya dipartai kami,dibuat organisasi yang didalamnya mengenai kegiatan pemberdayaan perempuan, dimana kegiatan tersebut melatih perempuan untuk menjadi perempuan yang cepat tanggap dan mampu menjalankan aktifitas khususnya perpolitikan bisa juga dikatakan sebagai pengkaderan untuk gender. Disini kita melatih perempuan PPP

sebelum terjun langsung di lembaga DPRD paling tidak kegiatan itu dapat memberikan hal positif bagi perempuan sekiranya mereka duduk di DPRD mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat tentunya. Dengan begitu mereka juga mampu melahirkan gagasan-gagasan yang dapat membangun semangat masyarakat untuk menjadi lebih baik khususnya bagi kaum perempuan itu sendiri.³⁰

Sama halnya yang dikemukakan oleh ketua fraksi PPP Makassar Busranuddin Baso Tika.

"Terkait mengenai perwakilan perempuan, kita ikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana pada proses pengkaderan, kita akomodir keterwakilan perempuan. Dan di PPP itu, kita mempunyai organisasi partai sayap jadi khusus pengkaderan perempuan ada namanya, wanita pembangunan untuk mengkader dan melatih para gender. Jadi tidak sulit PPP untuk mensetarakan yang seperti pemerintah inginkan dalam pencalonan politisi kemarin. Bahkan pencalonan perempuan anggota PPP kemarin melebihi dari batas yang telah ditetapkan".³¹

Pelibatan perempuan dalam partai politik lewat kaderisasi atau organisasi partai diharapkan bukan hanya mampu membuat perempuan merespon hambatan struktural, kultural, dan personal tetapi juga menyumbang terhadap reformasi dalam tubuh partai serta politik secara umum. Dalam upaya meningkatkan jumlah perempuan di parlemen, pandangan pertama menekan meningkatkan jumlah perempuan agar mampu berkompetisi di pemilu bebas.

Drs.Syahrir selaku ketua satu PPP wilayah Sulawesi Selatan juga mengatakan bahwa:

"yang pertama, tindakan kita berdasar kepada regulasi aturan main bahwa ada undang-undang yang menetapkan minimal 30%, keterwakilan perempuan. Berkaitan dengan struktur saya kira, PPP sudah melakukan representasi akan hal itu,

³⁰Wawancara dengan Dr.H.Humphrey R.Djamat, wakil ketua umum PPP, 22 juli 2016, pukul 11.25 wita

³¹Wawancara dengan Busranuddin Baso Tika, ketua satu PPP , 22 juli 2016, pukul 13.00 wita

sebab dilihat bahwa struktur organisasi ini juga memang banyak melibatkan unsur-unsur perempuan, saya kira hingga hari ini itu bahkan lebih dari 30% karna apapun alasannya sekarang kita lihat perempuan sudah banyak beraktifitas di rana politik sehingga ruang-ruang mereka tetap dibuka. Kemudian saya lihat bahwa ada dasar pertimbangan PPP karna perempuan itu adalah komunitas sangat banyak sehingga melibatkan unsur perempuan itu berarti akan memberikan daya simpati dan empati bagi masyarakat pemilih bagi perempuan pada umumnya. Bahwa Memang perempuan itu telah banyak terlibat dalam organisasi seperti kaukus perempuan politik dan sebagainya sehingga apapun alasannya akan menjadi pencerdasan bagi perempuan. Sehingga kembali lagi kepada mereka apakah ingin terlibat atau tidak tetapi yang jelasnya ruang mereka telah dibuka. Kemudian juga telah dilakukan pembinaan-pembinaan yang sebelumnya kami bentuk untuk calon legislatif perempuan PPP tentunya, dan didalam organisasi tersebut banyak membantu para calon politisi perempuan di partai kami agar mereka siap terjun membantu dimasyarakat.

Dalam perekrutan kader perempuan dalam setiap partai pada umumnya memilah dan memilih kader yang benar-benar memiliki kualitas berdasarkan latar belakang pendidikan, dan latar belakang sosial sehingga menempatkan seorang perempuan untuk menjadi pengurus partai maupun sebagai calon anggota legislatif.³²

Sesuai juga yang di kemukakan oleh salah satu calon politisi perempuan PPP :

*Sebelum mencalonkan di partai kita mempunyai organisasi khusus untuk perempuan, dan organisasi kita ini membantu perempuan untuk mampu mandiri, mampu berpolitik dengan baik, mampu membangun rasa percaya diri yang baik sebelum terjun langsung di parlemen khususnya menjadi anggota dewan tentunya. Karna kita menginginkan kader perempuan dari partai kami tidak memiliki kualitas atau kuantitas yang baik. Maka dari itu sebelum kita menuju langkah yang lebih jauh lagi di parlemen kita melatih diri kita sebagai perempuan yang mahir dalam berpolitik”.*³³

Meskipun rintangan-rintangan bagi kesetaraan perwakilan bagi perempuan dalam lembaga-lembaga politik yang mapan terasa berat rintangan-rintangan itu dapat diatasi dengan berabagai cara, para pendukung kesetaraan dalam sistem-sistem

³² Wawancara dengan Drs.Syahrir, sebagai ketua satu PPP wilayah Sulawesi Selatan, 28 juni 2016, 10:35 wita

³³ Wawancara dengan Nurfaedah, calon politisi perempuan PPP 29 juni 2016, 14.30 wita.

menyediakan daftar yang sangat strategis. Kaum perempuan yang menuntut kesetaraan telah menimbulkan dan terlibat dalam perdebatan mengenai perwakilan politik dan perubahan konstitusional mengenai rancangan kelembagaan. Tuntutan atas hak kaum perempuan berhasil karena terdapat suatu gerakan yang meluas dan dibangun secara kokoh yang diintegrasikan kedalam organisasi organisasi dan lembaga-lembaga politik yang tidak hanya memasukan klaim-klaim feminis ke dalam momentum yang semakin berkembang demi perubahan tetapi juga untuk membuat klaim itu tampak menentukan keberhasilan.³⁴

Ketika kembali mencari konsistensi partai politik peserta pemilu dengan sistem kuota 30 % bisa dilihat pada negara lain yang telah menetapkan sistem kuota ini, karena pada analisis sebelumnya Sistem kuota diperkenalkan untuk memastikan agar perempuan memiliki jumlah kursi minimum di dewan legislatif. Berbagai peraturan yang menetapkan kuota di parpol dan lembaga- lembaga pemerintahan dimaksudkan untuk membantu perempuan mengatasi kendala rendahnya representasi mereka di forum-forum pengambilan keputusan. Agar hasilnya efektif, penerapan program tindakan tegas dan penetapan kuota itu juga harus diiringi oleh jadwal yang pasti dan sasaran yang jelas.³⁵

Sedangkan menurut ibu Nasrah selaku sekretaris Kaukus perempuan politik Indonesia kota Makassar yang juga menjadi calon legislatif dari partai PPP pada pencalonan politisi perempuan kota Makassar priode 2014-2019 mengatakan bahwa:

³⁴ Wawancara dengan Nurhaedah sebagai salah satu calon legislatif partai PPP, 23 juli, pukul 10.24 wita

³⁵ M.Quraish Shihab *Perempuan*, H.,333

” sebelum terjun dipemilihan, partai kami membuat suatu organisasi khusus untuk perempuan dimana organisasi tersebut memberikan semacam panduan, bagaimana kita seorang perempuan bersosialisasi yang baik, dan paling penting disitu adalah bagaimana hak-hak perempuan dan hal-hal yang mengenai perempuan itu sendiri.panduan itu juga memberikan motivasi kita sebagai kader perempuan bisa membawa bekal ketika terjun kemasyarakat ”³⁶

Berkaitan dengan peran perempuan dalam bidang politik, gerakan perempuan sesungguhnya bertujuan untuk memulihkan hak-hak politik yang erat kaitannya dengan transformasi demokrasi. Gerakan perempuan juga bertujuan untuk menciptakan hubungan antara sesama manusia yang secara fundamental baru, lebih adil, dan saling menghargai.

Upaya yang dilakukan oleh partai PDIP dalam mempercepat kesetaraan gender adalah dengan merekrut sebanyak-banyaknya kader perempuan kemudian melakukan kegiatan khusus seperti mengadakan pembagian kelompok dibidang memasak dan menjahit dimana kegiatan tersebut dapat terlihat mana perempuan yang berkompeten dibidangnya dan mampu menjalankan tugas dengan baik, ketika duduk di legislatif dan dengan kegiatan itu pula partai PDIP mampu menarik suara masyarakat khususnya pemilih perempuan.

Sedangkan upaya yang dilakukan oleh partai PPP adalah dengan membuat suatu organisasi khusus perempuan kemudian dibuatkan suatu pembinaan-pembinaan serta panduan bagaimana cara seorang politisi perempuan dalam berpolitik karna

³⁶ Wawancara dengan Nasrah, sekretaris Kaukus perempuan politik Indonesia kota Makassar, 23 juli, pukul 11.00 wita

partai PPP meninginkan kaderisasi dari partainya yang memiliki kuantitas dan kualitas yang baik.

B. faktor penghambat *affirmative action* perempuan PDIP dan PPP pada pencalonan politisi legislatif perempuan kota Makassar priode 2014-2019

Di Indonesia sendiri hak untuk memilih dan dipilih yang setara antara laki-laki dan perempuan sudah berlaku sejak pemilu 1995 sampai sekarang. Namun dalam realitasnya partisipasi perempuan dalam menjadi calon legislatif masih belum memenuhi harapan. Jadi ada sebuah tantangan kita kalau benar-benar ingin mewujudkan *affirmative action* dalam bentuk sistem kuota pada pemilu 2009 yang akan kita lakukan terlebih dahulu adalah memperbaiki sistem politik dengan menghapuskan persepsi bahwa menganggap perempuan hanya pantas menjadi ibu rumah tangga, bukan warga masyarakat, apalagi aktor politik. Pemikiran seperti itu jelas sangat membatasi peluang perempuan untuk berperan aktif di panggung politik.

B.1 faktor penghambat *affirmative action* perempuan PDIP pada pencalonan politisi legislatif perempuan kota Makassar priode 2014-2019

Realitas sosial yang menggambarkan kecenderungan minimnya partisipasi politik perempuan dan rendahnya keterwakilan mereka dalam legislatif, dipengaruhi banyak faktor. salah satunya, yang disinyalir amat kuat pengaruhnya adalah budaya politik. Budaya menempatkan perempuan pada posisi yang lebih mengutamakan peran-peran domestik. Perempuan dibebani tanggung jawab yang lebih besar dalam

pengurusan rumah tangga, sehingga membutuhkan pula banyak waktu untuk mengataur hal tersebut.³⁷

Seperti halnya yang dikemukakan oleh .Munir anggota fraksi PDIP bahwa:

“saya melihat, penghambat calon legislatif perempuan adanya keterbatasan, baik itu permasalahan waktu, apa lagi perempuan yang telah berkeluarga akan ada pembagian waktu untuk mengurus hal-hal selain permasalahan pemerintahan politik.selain itu perempuan terkadang terhalang di penggunaan dana, dikebanyakan partai politik jarang ada perempuan yang bisa mencapai posisi pengambilan keputusan, berdasar kondisi inilah, partai-partai politik harus membuat semacam komitmen pra-pemilu mengenai seberapa besar presentase kandidat perempuan yang akan mereka orbitkan. Tapi kendalanya tak jarang perempuan menjadi ciut nyalinya untuk menapaki arena politik karena berbagai dana yang harus mereka pikul. Banyak perempuan yang memutuskan untuk terjun ke dalam pemilu terpaksa hanyut didalam kultur politik yang berlaku, yaitu menghamburkan uang untuk bersaing dengan kandidat-kandidat pria yang pada umumnya sudah memiliki basis finansial yang solid.”³⁸

Ada beberapa rekomendasi yang berkaitan dengan cara-cara memperkuat partisipasi politik perempuan Indonesia, ‘diluar jumlah semata’. (1) fokuskan perhatian pada parpol, untuk membuat mereka lebih ‘peka gender’ agar dapat meningkatkan jumlah kandidat perempuan didaftar partai, serta memberi mereka peluang yang sama untuk berpartisipasi pada proses-proses pengambilan keputusan. Secara konkrit ini menuntut perubahan pada penyusunan jadwal rapat partai, supaya dapat mengakomodasi peran ganda perempuan didalam rumah tangga dan kehidupan publik, serta memberi bantuan dana kampanye serta meningkatkan kualitas kepemimpinan mereka; (2) perlu dilakukan penggalangan suatu ‘massa kritis’

³⁷ Zaenal Mukarom 2005, Perempuan Dalam Politik Studi Kasus Mengenai Keterwakilan Perempuan Di Legislatif, pdf, hal, 264

³⁸ Wawancara dengan Munir anggota DPRD kota Makassar Fraksi PDIP 18 juli 2016, pukul 10:35 wita

(*critical mass*) yang terdiri dari organisasi-organisasi masyarakat madani yang mempunyai komitmen meningkatkan status perempuan, dan membantu mereka menumbuhkan rasa senasib-sepenanggungan dengan tokoh-tokoh perempuan dari dunia politik.

Ini antara lain dapat ditempuh dengan meningkatkan kegiatan kerjasama antar kelompok, memperkuat jaringan antar organisasi masyarakat madani dengan politisi perempuan, dan membantu langkah-langkah mereka untuk mempengaruhi jalannya pemerintahan lewat parlemen dan parpol-parpol, disamping menempuh tindakan *affirmative action* untuk memperlancar pemberdayaan politik kaum perempuan, memperkuat jalinan kerjasama antar berbagai organisasi dengan berbagai komponen masyarakat madani, dan membantu mereka dalam menyelenggarakan pelatihan yang ditujukan bagi para pemilih dan kandidat perempuan; (3) sangat disarankan untuk memanfaatkan lembaga-lembaga kultural dan keagamaan seperti organisasi keagamaan Fatayat, Aliyah, dan sebagainya, untuk mensosialisasikan keberadaan dan kiprah politisi perempuan kepada masyarakat luas. Pendekatan ini sangat cocok diterapkan pada masyarakat pedesaan, untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian mereka akan pentingnya peranan perempuan dalam kehidupan politik.³⁹

Sama halnya yang dikemukakan oleh ibu Vivin Kumalasari anggota DPRD dan mantan ketua fraksi PDIP

³⁹ Andri Rusta 2009, *Affirmative Action Untuk Demokrasi Yang Berkeadilan Gender Pada Pemilu 2009*, pdf, H. 17

"faktor penghambat affirmative action salah satunya adalah sumberdaya manusianya, permasalahan waktu tentunya karna kebanyakan dari calon legislatif itu sendiri sudah berkeluarga yang pada umumnya bukan hanya perpolitikan tapi mereka mempunyai tugas atau tanggung jawab terhadap keluarga mereka, selain itu disetiap daerah pasti memiliki kultur masyarakat tersendiri misalnya, banyak perempuan yang berpendapat bahwa dimana haknya laki-laki yang dianggap layak untuk duduk dipartai politik dan parlemen, selain itu beberapa masyarakat masih mengidentifikasikan perempuan sebagai mahluk nomor dua dibandingkan dengan laki-laki.

Memang diakui bahwa ada beberapa keterbatasan bagi perempuan untuk berkiprah dalam dunia politik. tiga diantaranya yang menonjol yaitu pertama aspek *supply and demand*. *Supply* berkaitan dengan faktor-faktor *principal* yang menentukan kemampuan politik perempuan. *Demand* merupakan faktor institusional yang berkaitan dengan masalah rekrutmen politik bagi perempuan. Antara *supply* dan *demand* ini tidak saling bergantung karena perempuan bisa saja mengantisipasi kesulitan-kesulitan praktis dalam mengombinasikan peran-peran domestiknya dengan jabatan-jabatan politik.⁴⁰

B.2 Faktor penghambat *affirmative action* perempuan PPP pada pencalonan politisi legislatif perempuan kota Makassar priode 2014-2019

Dalam sejarah politik Indonesia hampir tidak pernah ada tempat yang layak bagi kaum perempuan untuk berpartisipasi dalam posisi simetris, sepadan dan saling bersinergi dengan kaum laki-laki. misalnya saja, dalam sejarah perjalanan pemilu di Indonesia yang sudah dilakukan, mayoritas peserta pemilu umumnya didominasi oleh kaum laki-laki sehingga keberadaan kaum perempuan menjadi tak terwakili

⁴⁰ Wawancara Vivin Sukmasari anggota DPRD, mantan ketua fraksi PDIP, 22 juli 2016, 12.45 wita

(*underrepresented*) dalam semua jabatan politik. Karena posisinya *asimetris* dan di hampir semua jabatan politik, maka baik yang diangkat maupun yang dipilih lebih banyak dikuasai laki-laki, sehingga sangat wajar kalau kebijakan publik maupun politik yang dihasilkan tidak mengakomodasi kepentingan politik kaum perempuan.

Seperti halnya yang diungkapkan oleh bapak Dr.H.Humphrey R.Djamat sebagai wakil ketua umum partai PPP bahwa :

“Ada beberapa faktor yang menghambat affirmative action itu sendiri yang menjadi permasalahan untuk sebagian perempuan di partai kami, salah satunya adalah permasalahan waktu yang dimiliki oleh perempuan, dimana mereka dituntut untuk bisa berfokus kepada keluarga, disamping itu mereka ikut dalam pencalonan politis perempuan di parlemen, itu artinya mereka harus membagi waktu untuk melakukan aktifitas baik di keluarga maupun di politik. Banyaknya beban menghambat politik Perempuan Keadaan perempuan saat ini sudah banyak perubahan dan kemajuan, termasuk keterlibatan mereka dalam dunia politik. Itu pesan atau slogan yang sering didengar. Tapi persoalannya adalah seringkali aktivitas mereka di dunia politik menjadi beban yang berat karena mereka tetap juga dituntut untuk bertanggung jawab sepenuhnya di rumah. Bahkan dalam banyak kasus mereka juga berperan sebagai pencari uang untuk keluarga. Yang belakangan ini sangat terasa buat masyarakat kelas menengah kebawah. Karena penghasilan suami sudah tidak mencukupi lagi maka kalangan perempuan (sebagai istri) juga dituntut untuk mencari dana (tidak hanya sekedar mencari dana Tambahan), tapi sementara itu mereka tetap diwajibkan sebagai istri maupun ibu untuk bertanggung jawab penuh dalam rumah tangga dan keluarga, Pada saat bersamaan, karena tekanan sosial ekonomi yang semakin berat, kalangan perempuan biasanya aktif di dunia komunitas dalam rangka memperkuat solidaritas diantara mereka untuk saling membantu dan bergotong royong menghadapi beratnya beban kehidupan.”⁴¹

Seperti halnya juga yang dikatakan oleh Drs.Syahririr.M.SI,M.SH selaku ketua satu PPP wilayah Sulawesi Selatan bahwa:

⁴¹ Wawancara dengan Humphrey R.Djamat selaku wakil ketua umum PPP, 27 juli 2016, 11.30 wita

“Banyak hal yang menghambat affirmative action, yang pertama itu dari segi figuritas apakah figuritas mereka memang Nampak atau tidak, yang ke dua dari pilihan-pilihan dari masyarakat itu sendiri, karna ada orang yang cukup terpilih tapi elektabilitasnya tidak ada, yang ke tiga kaitan dengan masalah kemampuan sumberdaya politik karna paling tidak di era sekarang mungkin ada terbangun apa yang disebut idealisme dan apa yang disebut pramatisme kita tidak tau apakah masyarakat itu masih ada unsur pragmatisme sehingga muncul transaksional politik lalu ada juga muncul istilah serangan fajar, apakah kemudian perempuan mau melakukan hal itu? Apakah dia ditunjang oleh sumber daya politik diantaranya adalah mungkin financial. Kalau perempuan mau terjun ke era politik mereka harus berperan aktif walaupun mereka tidak bisa melakukan apa yang dikatakan dengan transaksional politik dia harus melakukan pembinaan-pembinaan, cuman saat ini apakah sumberdaya mereka saat ini sudah bagus? Pendidikan politiknya bagus? Itu kembali kepada mereka. Karna kita tau bahwa banyak diantara mereka yang sudah berkeluarga, bagaimana mungkin mereka mampu melakukan infrosisasi.

persoalan yang banyak dihadapi oleh perempuan adalah persoalan yang terkait dengan kehidupan mereka sehari-hari. Persoalan yang oleh masyarakat masih diberi label “persoalan perempuan”. Meskipun bila kita melihat dengan konteks yang lebih luas, persoalan yang dimunculkan sebenarnya adalah persoalan keluarga, komunitas lingkungan, meskipun mau tidak mau, harus diakui bahwa beban terbesar dari seluruh persoalan yang muncul adalah perempuan dan anak. perempuan harus memiliki sifat berani sifat berani biasanya hanya diperuntukan hanya untuk lelaki saja, tetapi berdasarkan teks folklor justru ditemukan perempuan yang luar biasa dan hebat serta berani. Dari keseluruhan teks folklor diperoleh sejumlah sifat yang dapat dikategorikan dalam representasi perempuan yang mampu mandiri karena berani. Persoalan yang dimunculkan bukan sekadar persoalan perempuan sebagai

perempuan. Tapi justru yang lebih banyak muncul adalah persoalan yang terkait peran yang dilabelkan pada perempuan secara cultural.⁴²

Secara umum, perempuan basis memandang Pemilu sebagai ajang untuk memilih wakil rakyat. Wakil rakyat dipahami sebagai orang yang dapat dipercaya oleh rakyat, bisa menyampaikan suara rakyat, dan mampu membawa kehidupan rakyat Indonesia ke arah yang lebih baik. Ketika digali pendapat peserta tentang wakil rakyat yang menjabat saat ini, pendapat yang muncul adalah sosok yang suka mengabaikan rakyat, tidak peduli dengan kemiskinan, OKB (Orang Kaya Baru). Mereka cenderung suka janji-janji palsu dan orang yang tidak bias dipercaya.⁴³

Dari eksplorasi yang dilakukan, mayoritas peserta belum mengerti urgensi keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Bagi mereka tidak masalah caleg laki-laki atau perempuan asal mau mengerti penderitaan rakyat.⁴⁴

Sama halnya yang diungkapkan oleh Busranuddin Baso Tika mengenai penghambat dari *affirmative action* di partai PPP bahwa :

Menurut saya tidak ada faktor penghambat yang spesifik. Yang ada faktor penghambat perempuan dalam hal ini adalah tim suksesnya, atau masraknya. jadi kemenangan dari berpolitik itu adalah tim sukses itu sendiri. Menurut saya tim sukses adalah data yang paling penting bagi setiap calon legislatif karna dari mereka kita tau dan menentukan kalah atau menangnya suatu partai atau calon legislatif".⁴⁵

⁴² Ery Iswary, *Perempuan Makassar*, (Yogyakarta, penerbit ombak 2010), H.144

⁴³ Wawancara dengan Syahririr, sebagai ketua satu PPP wilayah Sulawesi Selatan, 28 juni 2016, 10:35 wita

⁴⁴ A.Oriza Rania Putri 2013, Implementasi Ketentuan 30% Kuota Keterwakilan Perempuan Dalam Daftar Calon Anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Makassar, pdf, H. 53

⁴⁵ Wawancara dengan Busranuddin Baso Tika, ketua satu PPP , 22 juli 2016, pukul 13.00 wita

Kurangnya kehendak politik (*Political Will*) Meskipun keterlibatan perempuan di dunia politik sedikit banyak saat ini sudah bisa diterima, atau sedikitnya dilihat sebagai sesuatu yang wajar, tetapi pada dasarnya perempuan tidak menikmati *privelege* dan kesempatan yang sama dibandingkan lak-ilaki. Se jauh ini keterwakilan perempuan dalam posisi-posisi kepemimpinan masih sangat terbatas hanya pada tingkat otoritas menengah dan bawah. Sedangkan untuk masuk ke tingkat atas masih sangat sukar. Berbagai peraturan legislatif atau juga diperlukan dipberlakukan sistem kuota di beberapa negara memang membantu perempuan untuk berkiprah dalam dunia politik, tapi ini sebetulnya masih belum memadai. Yang sangat diperlukan adalah “kehendak Politik (*Political Will*)” yang kuat dari pemerintah, partai politik dan organisasi lainnya untuk menciptakan sebuah lingkungan politik yang kondusif bagi partisipasi atau pemberdayaan politik⁴⁶

Adapun hal yang diungkapkan oleh salah satu calon legislatif perempuan partai PPP yaitu Nurhaedah bahwa :

Kalau berbicara masalah penghambat, sebenarnya tidak ada karna menurut saya masyarakatnya yang kurang jeli dalam memilih kita, kita sebagai perempuan yang mencalonkan sebagai anggota legislatif sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memnuhi persyaratan yang semestinya. Namun ketika kita sudah terjun langsung ke lapangan semuanya bisa berubah karna apa? Karna masyarakat saat ini sudah merubah pemikiran mereka dan terkontaminasi dengan bujukan-bujukan yang mempengaruhi mereka. Mereka semua saat ini hampir sudah tidak melihat mana yang pantas untuk dipilih mana yang tidak. Mereka hanya berfikir mana yang memberi mereka sesuatu dan mana yang tidak. Padahal kenyataannya orang-orang yang terpilih atau dudukpun saat ini belum bisa melakukan apa-apa atau belum menunjukkan hasil dari apa yang sudah mereka katakan kepada masyarakat sebelumnya,

⁴⁶Safitri 2007, *affirmative action* 30 Persen Kuota Caleg Perempuan: Sebuah Semboyan?, jurnal, H.73

selain itu, faktor dualisme PPP yang menjadi salah satu faktor penghambat affirmative action perempuan di partai PPP hal ini dikarenakan didalam dualisme tersebut banyak pihak yang berusaha saling menjatuhkan satu sama lain.

Belum adanya sistem yang kondusif bagi partisipasi politik perempuan. Sistem ini dibutuhkan agar partisipasi politik perempuan dapat bahu membahu dalam meningkatkan kontribusi mereka percaturan politik intra maupun extra parlementer.⁴⁷ Tidak jauh berbeda dengan yang dikemukakan oleh ibu Nasrah selaku calon legislatif partai PPP bahwa :

Sebenarnya sudah jadi rahasia umum, kembali lagi kepada masyarakatnya, pemilihnya, sekarang masyarakat lebih memilih calon yang mampu memberikan sumbangsi yang lebih banyak ketimbang yang sedikit. Mereka menganggap bahwa yang lebih banyak yang memberikan sumbangsi kepada mereka akan lebih mampu membawa mereka kearah kesejahteraan, tapi nyatanya kita lihat sendiri bahkan bukan jadi hal yang disembunyikan lagi, segala sesuatu yang mereka telah keluarkan harus mampu kembali lebih dari apa yang mereka kluarkan. Itu sepertinya sudah mnjadi prinsip dalam perpolitikan. Sedangkan calon-calon yang hanya bermodalkan gagasan-gagasan yang mampu merubah masyarakat menjadi lebih baik, di kesampingkan. Mungkin kembali lagi kepada masyarakat, tidak selamanya yang mampu memberikan sumbangsi terbanyak mampu memebrikan perubahan yang baik pula nantinya. Tapi kita sebagai calon legislatif perempuan khususnya partai PPP akan terus berusaha memperlihatkan kepada masyarakat niat baik dan usaha-usaha untuk membangun kota masyarakat jauh lebih baik.

Dari faktor-faktor diatas, terlihat bahwa banyak hal yang mempengaruhi penerapan dan hasil dari *affirmative action* tentang 30% kuota caleg perempuan. Tidak hanya dari sistem budaya yang mengungkung, tetapi juga yang terbesar adalah

⁴⁷ Wawancara dengan Nurhaedah sebagai salah satu calon legislatif partai PPP, 23 juli, pukul 10.24 wita

dari faktor dalam diri perempuan itu sendiri. Secara yuridis, tidak ada hambatan dalam berpolitik untuk perempuan di Indonesia,⁴⁸

Terbukti presiden perempuan sudah pernah ada (Amerika, sebagai negara besar, belum pernah ada presiden perempuan). Jadi usaha yang terbesar yang harus dilakukan adalah merubah persepsi baik dari perempuan sendiri, maupun masyarakat terhadap perempuan yang aktif di politik, dan menumbuhkan minat pada perempuan untuk aktif berpolitik yang mampu menduduki posisi kepemimpinan. Selain itu masalah yang harus dipecahkan bersama adalah minimnya dukungan juga terhadap kualitas kerja perempuan di lembaga - lembaga politik serta upaya untuk merekrut kader politik perempuan. Terlebih lagi, rendahnya koordinasi antar kelompok yang bergerak dalam urusan gender juga mempengaruhi tingkat kesiapan kaum perempuan dalam menyambut pemilu yang akan datang, yang mana salah satu prasyarat utamanya ialah mengidentifikasi kandidat politisi perempuan. Faktor terbesar penghambat terjunnya perempuan dalam politik tidak hanya terkait dengan individu perempuan, laki-laki dan sosialisasi, namun juga melibatkan struktur-struktur sosial dan prinsip-prinsip Organisasi Perempuan harus membuktikan perannya dalam perpolitikan nasional, harus aktif dengan lembaga-lembaga kajian perempuan, mencapai kemandirian politik, menjaga kesetaraan dengan laki-laki dalam menjalankan peran politik.⁴⁹

⁴⁹ Wawancara dengan Nasrah selaku sekretaris kaukus perempuan Indonesia dan calon legislatif partai PPP, 30 juli, 14.00 wita

Faktor penghambat *affirmative action* pada partai PDIP di Makassar adalah mengenai permasalahan waktu dan keluarga, hal ini dikarenakan hampir semua para calon politisi perempuan sudah berkeluarga sehingga ketika mereka masuk didunia politik secara tidaklangsung waktu mereka akan terbagi dengan keluarga. Urusan-urusan mengenai politik otomatis juga akan terbagi, karna perempuan belum mampu membagi waktu mereka dengan baik. Selain itu, budaya juga menjadi salah satu faktor penghambat *affirmative action*. Dimana haknya laki-laki yang dianggap layak untuk duduk di partai sedangkan perempuan sebagai mahluk nomor dua dibandingkan laki-laki.

Sedangkan faktor penghambat *affirmative action* dari partai PPP di Kota Makasaar itu sendiri, mengenai faktor eksternal dan internal. Faktor internalnya adalah permasalahan dari segi waktu, *financial*, perempuan sulit untuk mengatur waktu mereka karna tugas mereka bukan hanya mengurus partai atau politik melainkan mereka juga mempunyai tugas untuk memperhatikan permasalahan lain seperti keluarga. Selain itu permasalahan *financial*, tidak banyak perempuan mau mengorbankan dana yang cukup besar demi sebuah jabatan. Masalah lain muncul dari segi eksternal, dalam segi ini, lebih mengarah kepada upaya tim sukses dari setiap kandidat yang tidak sepenuhnya mampu membantu para calon kandidiat Legislatif perempuan, selain itu masyarakat kurang jeli dalam memilih pilihannya. Kita ketahui pada saat ini, masyarakat lebih cenderung terhadap kandidat yang memiliki *financial* yang lebih, sehingga kandidat-kandidat perempuan lain yang hanya memiliki modal bantuan untuk mewujudkan keinginan mereka nantinya tidak diberikan kesempatan

sama sekali. Selain itu, faktor dualisme PPP yang menjadi salah satu faktor penghambat *affirmative action* perempuan di partai PPP hal ini dikarenakan didalam dualisme tersebut banyak pihak yang berusaha saling menjatuhkan satu sama lain. Banyaknya calon politisi perempuan dari partai PPP juga menjadi salah satu faktor penghambat *affirmative action*, masyarakat akan lebih sulit memilih karena terlalu banyaknya pilihan yang diberikan.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Upaya yang dilakukan oleh PDIP Dan PPP dalam mempercepat kesetaraan gender pada pencalonan politisi perempuan kota Makassar priode 2014-2019

Pada partai PDIP upaya yang dilakukan untuk mempercepat kesetaraan gender yaitu yang pertama lebih kepada pemenuhan syarat kouta 30% untuk perempuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan, selanjutnya partai PDIP melakukan pengkretrutan kemudian melakukan kegiatan khusus seperti mengadakan pembagian kelompok dibidang memasak dan menjahit dimana kegiatan tersebut dapat terlihat mana perempuan yang berkompeten dibidangnya dan mampu menjalankan tugas dengan baik, ketika duduk di legislatif dan dengan kegiatan itu pula partai PDIP mampu menarik suara masyarakat khususnya pemilih perempuan.

Sedangkan pada partai PPP sendiri, upaya yang dilakukan untuk mempercepat kesetaraan gender, dengan membuat suatu organisasi khusus perempuan kemudian dibuatkan suatu pembinaan-pembinaan serta panduan bagaimana cara seorang politisi perempuan dalam berpolitik karna partai PPP meningkatkan kaderisasi dari partainya yang memiliki kuantitas dan kualitas yang baik.

2. Faktor penghambat *affirmative action* PDIP dan PPP dalam pencalonan politisi legislatif pada pencalonan politisi kota Makassar priode 2014-2019

Hambatan individu merupakan masalah yang paling menjadi penghambat pemberdayaan atau partisipasi politik perempuan. Faktor penghambat *affirmative action* dari partai PDIP adalah keterbatasan waktu, dan budaya prioritas perempuan adalah keluarga, ketika memasuki dunia politik mereka harus membagi waktunya antara keluarga dan politik, atau lembaga. Sedangkan budaya, masih menganut paham bahwa laki-laki lah yang lebih pantas berada dalam suatu lembaga dan perempuan masih dinomorduakan.

Sedangkan yang menjadi faktor penghambat *affirmative action* dari partai PPP adalah mengenai faktor eksternal dan internal. Faktor internalnya adalah permasalahan dari segi waktu, *financial*, dan dualisme. Perempuan sulit untuk mengatur waktu mereka karena tugas mereka bukan hanya mengurus partai atau politik melainkan mereka juga mempunyai tugas untuk memperhatikan permasalahan lain seperti keluarga. Selain itu permasalahan *financial*, tidak banyak perempuan mau mengeluarkan dana yang cukup banyak demi sebuah jabatan. Masalah lain muncul dari segi eksternal, dalam segi ini, lebih mengarah kepada upaya tim sukses dari setiap kandidat yang tidak sepenuhnya mampu membantu para calon kandidat Legislatif perempuan, selain itu masyarakat kurang jeli dalam memilih pilihannya. pada saat ini, masyarakat lebih condong terhadap kandidat yang memiliki *financial* yang lebih, sehingga kandidat-kandidat perempuan lain yang hanya memiliki modal bantuan untuk mewujudkan keinginan mereka nantinya tidak diberikan kesempatan

sama sekali. Selain itu, faktor dualisme PPP yang menjadi salah satu faktor penghambat *affirmative action* perempuan di partai PPP hal ini dikarenakan didalam dualisme tersebut banyak pihak yang berusaha saling menjatuhkan satu sama lain. Banyaknya calon politisi perempuan dari partai PPP juga menjadi salah satu faktor penghambat *affirmative action*, masyarakat akan lebih sulit memilih karena terlalu banyaknya pilihan yang diberikan.



B. SARAN

Dari hasil analisis data dan kesimpulan, penulis mencoba memberikan saran-saran atau masukan kepada partai PDIP dan partai PPP antara lain

1. Partai PDIP harus mempertahankan komitmen pengkaderan terhadap setiap legislatif perempuan, demi mendapatkan kader yang mempunyai kualitas dan kuantitas yang baik.
2. Partai PPP harus lebih memperbanyak masukan-masukan atau kegiatan-kegiatan terhadap para kaderesasi perempuan didalam partainya, agar calon legislatif perempuan partai PPP selanjutnya mampu memperkuat dan meningkatkan usahanya dalam pemilihan politisi legislatif pada priode berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quranul Karim Depertemen Agama RI syaamil AL-Qur'an
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar ilmu Politik*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2008
- Bungin, Burhan, *Komunikasi, Ekonomi ,Kebijakn publik dan Ilmu sosial*. Jakarta:Kencana Prenada Media Group,2007
- Eka Anggriani Cholidah, *Analisis Komperatif Rekrutmen Prempuan Dalam Partai Politik Studi Kasus PDIP Dan PKS Kota Surakarta*. 2014
- Fakih, Mansour, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*,Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1999
- Haris, Syamsuddin , *Pemilu Langsung Oligarki Partai*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama 2005
- Hasyim, Syafiq, *Feminisme Dan Fundamentalisme*, Yogyakarta, PT LkiS Pelangi Aksara, 2005
- Harsyah Fhathia, *Perbandingan Partisipasi Politik Perempuan di Partai Nasdem dan Partai PKS Kabupaten Batu Bara. Jurnal*,2014
- Iswary Ery, *Perempuan MAKASSAR Relasi Gender Dalam Folklor*,Yogyakarta, penerbit ombak, 2010
- Jurdi, Syarifuddin, *Kekuatan-Kekuatan Politik Indonesia*, Makassar: PT Gramasurya Yogyakarta,2015

Kencana, Syafii Inu., *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994

Kumpulan Hadist , diakses 08-03-2016

Lovenduski Joni, *Politik Berparas Perempuan*, Yogyakarta PT Kansius 2008

Mulia, Musdah, *Menuju Kemandirian Politik Perempuan*, Yogyakarta: kibar press, 2008

Pasaribu, Vera A.R ,*Kesetaraan Dan Keadilan Gender*, pdf, 2006

Prayitno, Budi, *Pelembagaan Politik PDIP Jateng*, Tesis, 2009

Rusta, Andri, *Affirmative Action Untuk Demokrasi Yang Berkeadilan Gender Pada Pemilu 2009*, pdf, 2009

Ramdani, Ririn, “*Perempuan Politik, Dan Parlemen Di Kota Makassar*” Skripsi, 2015

Rania, Putrid Andi Oriza, *Implementasi Ketentuan 30% Kuota Keterwakilan Perempuan Dalam Daftar Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Dan Kota Makassar*, Skripsi, 2013

Safitri, *Affirmative Action 30% Kouta Caleg Perempuan Sebuah Semboyan*, jurnal psikologi affirmative action, 2008

Shihab, Quraish, *Perempuan*, Tangerang, Lentera Hati, 2005

Taufik, *Elektabilitas Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Pada Pemilu 2014 Di DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta.)*, pdf, 2014

W.Creswell Jhon, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Dan Mixed* Yogyakarta :pustaka belajar, 2009

